

NEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Agustus I Tahun 2025 No. 63

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

*Kreatif, Atraktif, Substantif*



*Soroti Pelabelan Beras  
yang tak Sesuai*

*Peredaran  
Beras Perlu  
diawasi Ketat*

*Dr. H. Abdul Kharis  
Almasyhari, S.E., M.Si*



Dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ketegangan geopolitik terus meningkat, konflik bersenjata meletus di berbagai kawasan, ketidakpastian ekonomi global membayangi banyak negara, sementara dampak perubahan iklim semakin nyata di depan mata. Dunia menghadapi situasi yang disebut banyak pengamat sebagai “dekade ketidakpastian” (the age of polycrisis).

Perang di Ukraina yang belum berakhir, krisis kemanusiaan di Palestina yang terus menelan korban, konflik di Timur Tengah yang meluas, serta ketegangan di kawasan Indo-Pasifik — semuanya berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas regional, harga pangan, energi, hingga kepercayaan investor. Inflasi global, gejolak kurs, serta krisis rantai pasok menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di tengah situasi global yang fluktuatif ini, Indonesia memikul tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas dalam negeri, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar. Agenda Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi titik tumpu bagi upaya penguatan kemandirian nasional.

Dalam konteks inilah, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI mengambil peran aktif



# Mengawal Pemerintahan dalam Tantangan Global

Fraksi PKS juga menyadari bahwa menjadi bagian dari koalisi bukan berarti menutup mata terhadap dinamika di lapangan. Tugas pengawalan tetap dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kritis namun konstruktif, dan tetap menjaga integritas politik.

dalam menampuk tugas di Parlemen. Kami menyadari, dalam menghadapi tantangan global yang kompleks, diperlukan sinergi kekuatan nasional yang solid, bukan fragmentasi. Fraksi PKS ingin menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri, mengawal arah kebijakan pemerintah, sekaligus terus membawa suara

aspirasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, Fraksi PKS juga menyadari bahwa menjadi bagian dari koalisi bukan berarti menutup mata terhadap dinamika di lapangan. Tugas pengawalan tetap dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kritis namun konstruktif, dan tetap menjaga integritas politik.

Sebab dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, justru dibutuhkan pemerintahan yang adaptif, responsif, namun tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Fraksi PKS ingin terus mengambil bagian dalam upaya kolektif membangun kemandirian bangsa di tengah pusaran global. Menghadapi tantangan

global, kita tidak bisa hanya berharap; kita harus terus berikhtir, berbenah, dan bersatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing bangsa ini menjaga kedaulatan dan keadilan di tengah arus dunia yang terus berubah.

Salam hormat dari kami,  
Humas FPKS DPR RI



# **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*



# FRAKSI PKS DPR RI

*Kreatif, Atraktif, Substantif*



KETUA FRAKSI

**Dr. H. ABDUL  
KHARIS  
ALMASYHARI**  
S.E., M.Si., M.K.

WAKIL  
BENDAHARA

**ISMAIL  
BACHTIAR**

SEKRETARIS

**Hj. LEDIA  
HANIFA  
AMALIAH**  
S.S., M.Pd.

WAKIL  
SEKRETARIS

**IZZUDDIN  
ALQASSAM  
KASUBA**

BENDAHARA

**Dr. Hj. KURNIASIH  
MUFIDAYATI** M.S.

WAKABID  
POLHUKAM

**Dr. H.  
SUKAMTA**

WAKABID KESRA

**Dr. Hj. NETTY  
PRASETYANI** M.S.

WAKABID KINERJA

**Drs. H. ADANG  
DARADJATUN**

WAKABID EKKU

**AMIN AK** M.M.

WAKABID INBANG

**ABDUL HADI**  
S.E., M.M.



image istimewa

## Sukamta Berharap Konflik Thailand dan Kamboja Mereda Demi Stabilitas Kawasan

Jakarta (26/07) — Meningkatnya pertikaian bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang dipicu sengketa wilayah di sekitar kuil suci Preah Vihear, dikhawatirkan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta akan melemahkan stabilitas kawasan Asia Tenggara

"Tentu kita harapkan tidak ada eskalasi konflik dan kedua belah pihak bisa segera melaksanakan gencatan senjata. Meski konflik di wilayah perbatasan ini sudah berulang terjadi, selama ini juga cepat dilakukan de-eskalasi dan perdamaian. Saya optimis proses perdamai-

"Hubungan baik antara Indonesia dengan kedua negara dapat digunakan untuk menjembatani proses perdamaian. Jika diperlukan Indonesia juga bisa mendorong adanya pertemuan tingkat ASEAN untuk membahas secara khusus upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja."

### H. SUKAMTA, Ph.D

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

an untuk konflik saat ini juga akan mudah diwujudkan. Baik Thailand maupun Kamboja tentu tidak ingin ada korban jiwa bertambah juga sektor ekonomi terpuhul akibat perang."

Saat ditanya apakah ada dampak langsung konflik terhadap Indonesia. Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyatakan Indonesia karena tidak berbatasan langsung dengan kedua negara tidak akan mendapatkan dampak secara langsung. Namun demikian jika konflik membesar, bisa jadi akan ada potensi kerentanan dengan hadirnya pengungsi atau perdagangan senjata melalui wilayah negara ketiga.

"Yang lebih saya khawatirkan lebih kepada gangguan terhadap stabilitas kawasan ASEAN. Dalam situasi global yang sedang rentan konflik dan mengalami tekanan ekonomi, kerjasama kawasan

regional sangat penting untuk dikuatkan. Kawasan ASEAN merupakan wilayah yang sangat strategis dan banyak dilirik oleh kekuatan dunia karena potensi ekonomi dan sumber daya alamnya. Jika hubungan antara negara ASEAN rapuh, akan rentan kepada konflik proxy."

Sukamta berharap pemerintah Indonesia bisa proaktif untuk mendorong proses perdamaian antara Thailand dan Kamboja baik melalui hubungan diplomatik dengan kedua belah negara maupun melalui ASEAN.

"Hubungan baik antara Indonesia dengan kedua negara dapat digunakan untuk menjembatani proses perdamaian. Jika diperlukan Indonesia juga bisa mendorong adanya pertemuan tingkat ASEAN untuk membahas secara khusus upaya perdamaian antara Thailand dan Kamboja."



## Komisi II FPKS Aher Dukung Komitmen Kementerian ATR/BPN Lindungi Hak Atas Tanah Warisan Masyarakat

Jakarta (19/07) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang memastikan tidak akan mengambil alih tanah warisan milik warga yang telah bersertifikat.

Pernyataan ini, imbuhnya, menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah yang telah mereka warisi secara sah dan legal. Kepemilikan yang sudah bersertifikat menunjukkan adanya kekuatan hukum yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

"Kami mengapresiasi sikap kementerian ATR/BPN dengan tegas menyatakan tidak akan mengganggu status tanah warisan yang sudah bersertifikat. Ini adalah bentuk langkah dan komitmen yang sangat baik serta sangat melindungi kepentingan masyarakat luas," ujar

Kang Aher dalam pernyataan tertulisnya.

Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menekankan bahwa pentingnya Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat sistem pertanahan yang adil dan transparan, agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan atau kekhawatiran masyarakat terhadap status kepemilikan tanahnya.

"Kami menilai pentingnya pemerintah untuk terus memperkuat sistem pertanahan yang adil dan transparan, agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan atau

kekhawatiran masyarakat terhadap status kepemilikan tanahnya," tegas Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 daerah pemilihan Jawa Barat II ini.

Terakhir, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini memastikan bahwa sebagai mitra kerja strategis kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI akan terus mendorong agar kebijakan pemerintah dalam penertiban tanah dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, serta tidak merugikan masyarakat yang telah taat hukum dan memanfaatkan tanahnya sesuai peruntukan.

"Kami akan terus mengawasi dan mendukung kebijakan yang berpihak pada keadilan, serta menjaga hak-hak konstitusional rakyat atas tanahnya," demikian tutup Kang Aher.



"Kami menilai pentingnya pemerintah untuk terus memperkuat sistem pertanahan yang adil dan transparan, agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan atau kekhawatiran masyarakat terhadap status kepemilikan tanahnya,"

**Dr. H. AHMAD  
HERYAWAN, Lc., M.Si.**

Anggota Komisi II DPR RI



## Aleg PKS Nasir Djamil Desak Mabes Polri Bongkar Sindikat Perdagangan Bayi Berkedok Adopsi

Jakarta (22/07) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyoroiti dengan tajam kasus perdagangan orang berkedok adopsi yang diungkap oleh Polda Jawa Barat.

Dalam pernyataannya yang disampaikan dalam program Top Issue Metro TV pada Senin (21/7), Nasir mendesak agar Mabes Polri ikut turun tangan mengusut tuntas sindikat yang disebutnya rapi dan melibatkan jaringan lintas negara.

“Kita terima kasih sama Polda Jabar karena melakukan penindakan terhadap perdagangan orang dengan kedok mengadopsi. Jaringannya sangat kompleks dan rapi sehingga sulit dilacak, bahkan melibatkan lintas negara,” ujar Nasir Djamil.

Ia menilai kasus ini bukan hanya kejahatan biasa, melainkan bentuk kejahatan

kemanusiaan yang biadab. Apalagi, dalam laporan disebutkan bahwa bayi-bayi sudah ‘diorder’ sejak masih dalam kandungan.

“Ini sangat bertentangan dengan kemanusiaan yang beradab. Bahkan sudah diorder ketika masih dalam kandungan. Ini sangat biadab. Karena itu, tidak ada cara lain kecuali Polda Jabar dan Mabes Polri harus bisa mengungkap seterang-terangnya,” tegasnya.

Nasir juga mengingatkan agar kasus ini tidak bernaib seperti kasus serupa yang mencuat pada tahun 2016 namun kemudian tenggelam tanpa kejelasan. Ia berharap

penegakan hukum berjalan serius dan menyeluruh agar sindikat ini benar-benar terbongkar hingga ke akar-akarnya.

“Kalau menurut saya, ini bukan cuma soal faktor ekonomi atau pendidikan, tapi karena lemahnya pengawasan dan integritas institusi negara. Bisa jadi ada oknum aparat penegak hukum atau instansi administrasi kependudukan yang terlibat. Ini harus dibongkar habis,” katanya.

Nasir juga meragukan pengakuan para pelaku yang menyebut bayi-bayi itu dikirim ke Singapura. Ia meminta agar penyidik tidak mudah percaya dan mendalami lebih lanjut kemungkinan adanya penyimpangan lain, termasuk kemungkinan perdagangan organ.

Lebih lanjut, Nasir menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang menurutnya membutuhkan sinergi lintas sektor secara nyata, bukan hanya di atas kertas.

“Negara seharusnya tidak kalah dengan pelaku kejahatan. Ini bukan soal barang, ini soal orang—apalagi bayi. Maka negara wajib melindungi. Harus ada kerjasama semua institusi negara untuk melawan sindikat ini,” pungkasnya.



“Ini sangat bertentangan dengan kemanusiaan yang beradab. Bahkan sudah diorder ketika masih dalam kandungan. Ini sangat biadab. Karena itu, tidak ada cara lain kecuali Polda Jabar dan Mabes Polri harus bisa mengungkap seterang-terangnya,”

**Dr. H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**

Anggota Komisi III DPR RI



image istimewa

## Aboe Bakar Soroti Penanganan Kasus Narkoba dan Penyitaan Tanah dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke NTT

Kupang, NTT – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama tim Komisi III sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja sektor hukum dan keamanan. Dalam kunjungan tersebut, Komisi III bertemu dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) NTT, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTT.

Dalam pertemuan tersebut, Aboe Bakar memberikan apresiasi atas keberhasilan Operasi Pekat Turangga yang digelar oleh Polda NTT pada Mei lalu. Operasi ini dinilai efektif dalam menekan angka kriminalitas dan penyakit masyarakat, dengan total 92 kasus premanisme dan tindak kejahatan berhasil ditangani.

"Ini adalah capaian luar biasa dari Polda NTT. Operasi Pekat Turangga menunjukkan komitmen aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," ujar Aboe Bakar dalam keterangannya di Kupang, Kamis (25/7/2025).

Tak hanya itu, Aboe juga mengapresiasi keberhasilan pengungkapan jaringan peredaran zat berbahaya jenis poppers, dengan barang bukti mencapai 14.000 botol yang berhasil diamankan oleh Polda

NTT. "Temuan ini menunjukkan bahwa NTT tidak hanya menjadi jalur lintasan, tapi juga mulai menjadi target distribusi narkoba dan zat adiktif. Tindakan tegas seperti ini patut didukung," tambahnya.

Namun, dalam kesempatan yang sama, Aboe Bakar juga menyoroti penanganan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP FWLS, yang dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil tes urine. Ia meminta kejelasan tindak lanjut atas kasus tersebut.

"Kasus ini sangat sensitif, karena menyangkut integritas institusi Polri. Harus ada transparansi dan ketegasan dalam penanganannya," tegasnya.

Selain soal narkoba, Aboe Bakar juga menyinggung perihal

## Aboe Bakar Soroti Penanganan Kasus Narkoba dan Penyitaan Tanah dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke NTT

### « SEBELUMNYA

penyitaan tanah seluas 99.785 meter persegi milik keluarga Konay oleh Kejati NTT. Tanah tersebut, menurutnya, telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan sejak 1997. Ia mempertanyakan dasar hukum penyitaan yang dilakukan, mengingat ada potensi pergeseran dari perkara perdata ke pidana.

"Saya ingin tahu apakah penyitaan ini telah dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah Kejati NTT telah menghormati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Ini soal supremasi hukum," kata Aboe Bakar.

Ia juga meminta penjelasan sejauh mana Kejati NTT melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Hukum dan HAM, terkait kepemilikan tanah tersebut.

"Apakah ada bukti dari BPN bahwa tanah itu adalah milik Kemenkumham? Dan apakah Kejati sudah mendapatkan konfirmasi resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJ-KN) bahwa objek tanah tersebut memang termasuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN)?" tanyanya.

Menurut Aboe Bakar, transparansi dan prosedur hukum yang akuntabel sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari agenda rutin Komisi III DPR RI dalam memastikan pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum dan pengelolaan administrasi hukum di daerah berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip keadilan.



"Saya ingin tahu apakah penyitaan ini telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah Kejati NTT telah menghormati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Ini soal supremasi hukum,"

**HABIB ABOE  
BAKAR ALHABSYI**

Anggota Komisi III DPR RI



image istimewa

## Aleg PKS Abdul Kharis Dorong Pengawasan Ketat Peredaran Beras, Soroti Praktik Pelabelan yang Tak Sesuai

Jakarta (25/07) — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari, menyoroti temuan terkait dugaan praktik pelabelan beras yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya.

Ia mendorong Kementerian Pertanian dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan distribusi beras, guna melindungi hak konsumen.

Dalam rapat bersama Komisi IV, Kementerian Pertanian melaporkan adanya beras

“Pengawasan mutu dan keterbukaan informasi harga adalah bagian dari perlindungan konsumen. Ini penting agar masyarakat mendapatkan barang sesuai kualitas dan harga yang wajar,”

### Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

kualitas medium yang dijual dengan label premium, serta dugaan praktik pencampuran beras (oplosan), termasuk pada sebagian produk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Jika beras itu medium, ya harus dijual sebagai beras medium. Tidak seharusnya diberi label premium karena itu akan menyesatkan konsumen dan berdampak pada harga,” ujar Abdul Kharis.

Ia mengapresiasi sikap Presiden yang mendukung langkah tegas untuk melindungi konsumen, termasuk dalam hal akurasi timbangan dan kejujuran pelabelan produk.

“Pengawasan mutu dan keterbukaan informasi harga adalah bagian dari perlindungan konsumen. Ini penting agar masyarakat mendapatkan barang sesuai kualitas dan harga yang wajar,” tambahnya.

Abdul Kharis juga meminta Kementerian Pertanian untuk segera berkoordinasi dengan

aparat penegak hukum guna menindaklanjuti temuan tersebut.

“Apapun alasannya, tidak dibenarkan melakukan praktik oplosan atau pelabelan yang tidak sesuai. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan nasional,” tegasnya.

Terkait penanganan beras yang sudah terlanjur masuk pasar dengan pelabelan tidak tepat, ia mengusulkan agar produk tersebut tetap dijual, namun dengan harga yang disesuaikan dengan kualitas sebenarnya.

“Jangan serta-merta ditarik. Jika memang kualitasnya medium, maka bisa tetap dijual sebagai medium dengan harga yang sesuai,” jelasnya.

Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal tata kelola pangan nasional agar berjalan adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat.

# Aleg PKS Rahmat Saleh Dorong Konsolidasi Lintas Sektor untuk Ketahanan Pangan Nasional

Pariaman (25/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjawab tantangan ketahanan pangan di masa depan.

Hal itu disampaikannya saat meresmikan Program Penanaman Jagung Untuk Ketahanan Pangan Nasional di Sumatera Barat di Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (24/07/2025).  
Program ini melibatkan sejumlah pihak, Pemprov Sumbar, Polda Sumbar, Pemkab Padang Pariaman dengan Paten Mekar Tani serta Mekar Investma Teknologi.

Program penanaman jagung skala besar di Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Hari ini kita menyaksikan peluncuran gerakan konsolidasi yang sangat penting. Ada sinergi antara Kapolda, PT Paten Mekar Tani, dan pemerintah daerah Sumatera Barat untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya produksi jagung," katanya.

Rahmat menilai kolaborasi ini mencerminkan kesadaran bersama akan pentingnya pemanfaatan sumber daya yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.

"Ada banyak lahan tidur milik masyarakat maupun pemerintah. Melalui program ini, kita berupaya menghidupkan kembali potensi tersebut menjadi sumber pangan yang produktif," jelasnya.

Rahmat mengapresiasi peran PT Paten Mekar Tani sebagai penyedia dukungan teknis dan logistik, termasuk modal, pupuk, infrastruktur, dan bibit unggul.

Menurutnya, pendekatan seperti ini sangat dibutuhkan agar petani tak hanya dibebani produksi, tapi juga didukung secara menyeluruh.

"Sumatera Barat memiliki

potensi lahan jagung sekitar 200 ribu hektare. Jika ini kita garap serius dan berkelanjutan, Sumbar bisa menjadi pionir dalam ketahanan pangan jagung di Indonesia," katanya.

"Kita berharap gerakan ini tidak hanya seremonial. Harus ada tindak lanjut nyata, monitoring, dan perbaikan terus-menerus," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan saat ini Sumbar masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan jagung.

"Hanya 40 persen kebutuhan jagung yang mampu dipenuhi dari daerah sendiri, sisanya harus didatangkan dari luar atau bahkan impor," jelasnya.

Untuk itu, Mahyeldi berharap agar program yang diluncurkan ini dapat menjadi titik balik bagi peningkatan produksi lokal.

"Kami punya banyak lahan tidur yang siap dikelola. PT Mekar Investma hadir untuk membantu pengolahan lahan, penyediaan bibit, pupuk, dan alat pertanian. Target kita, 1.000 hektare dapat mulai



"Sumatera Barat memiliki potensi lahan jagung sekitar 200 ribu hektare. Jika ini kita garap serius dan berkelanjutan, Sumbar bisa menjadi pionir dalam ketahanan pangan jagung di Indonesia,

**H. RAHMAT SALEH,**  
**S.Farm., M.IP**  
Anggota Komisi IV DPR RI

dikelola pada Agustus mendatang," tuturnya.



## Komisi IV FPKS Slamet Desak Pemerintah Revisi HET Beras Demi Keadilan bagi Petani, Pedagang, dan Konsumen

Jakarta (19/07) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet mendesak pemerintah untuk segera merevisi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras agar lebih berkeadilan bagi seluruh pelaku dalam ekosistem pangan, mulai dari petani, pedagang, hingga konsumen.

Menurut Slamet, saat ini harga gabah di tingkat petani telah menembus angka Rp7.000 per kilogram, jauh di atas asumsi dasar perumusan HET yang berlaku saat ini.

Sementara itu secara nasional, imbuh Slamet, harga beras premium rata-rata sudah mencapai Rp16.602 per kilogram, dan beras medium menyentuh Rp14.317 per kilogram. Padahal, HET yang berlaku saat ini masih Rp14.900 untuk beras premium dan Rp12.500 untuk beras medium.

"Jika tidak segera disesuaikan, kebijakan HET ini justru bisa merugikan petani sebagai produsen dan pedagang sebagai pelaku distribusi, sementara konsumen juga tetap menanggung harga mahal akibat gejala pasar yang tidak dikendalikan dengan adil," ujar Slamet.

Ia menegaskan bahwa kebijakan pangan, terutama dalam hal penetapan HET, harus responsif terhadap dinamika harga di lapangan. Revisi HET harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif

dan berbasis data terbaru, agar tidak terjadi distorsi harga yang memperlebar kesenjangan antar pelaku usaha pangan.

Di sisi lain, Slamet juga mengingatkan bahwa praktik pengoplosan beras seperti mencampur beras medium dan premium lalu menjualnya dengan label menyesatkan merupakan pelanggaran hukum serius yang tidak bisa ditoleransi.

"Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Tindakan mengoplos beras adalah keja-

hatan yang merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pangan. Pemerintah harus memberikan sanksi pidana yang tegas untuk memberi efek jera," tegasnya.

Ia mendorong penguatan sistem pengawasan distribusi pangan, termasuk keterlibatan aparat penegak hukum, guna memastikan perlindungan terhadap konsumen sekaligus menjaga integritas pasar beras nasional.

Slamet menutup pernyataan dengan menegaskan bahwa kebijakan pangan yang berkeadilan harus dimulai dari niat politik yang kuat untuk melindungi semua pihak secara proporsional: petani tidak dirugikan, pedagang tidak ditekan, dan konsumen tidak dibebani.

"Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Tindakan mengoplos beras adalah kejahatan yang merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pangan. Pemerintah harus memberikan sanksi pidana yang tegas untuk memberi efek jera,"

**drh. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI



image istimewa

## Riyono Caping: Beras Oplosan Karena 90% Pasar Beras dikuasai Swasta

Jakarta (15/07) — Satgas pangan merilis ada 212 perusahaan bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen senilai 3.2 triliun, angka yang fantastis. Jika saja dihitung manual per kg kerugiannya 5000 rupiah

maka perkiraan beras oplosan yang beredar 700.000 ton di pasar. Kebutuhan bulanan beras nasional adalah 2.6 juta ton. Hampir 25% beras yang beredar diduga oplosan.

“Beras oplosan berkualitas premium yang dipasarkan oleh oknum perusahaan beras ini

“Beras oplosan berkualitas premium yang dipasarkan oleh oknum perusahaan beras ini sangat merusak dan menciderai petani kita, merusak mental dan hanya berpikir keuntungan saja”

**RIYONO, S.Kel., M.Si.**

Anggota Komisi IV DPR RI

sangat merusak dan menciderai petani kita, merusak mental dan hanya berpikir keuntungan saja” protes Riyono Caping Anggota Komisi IV DPR FPKS

Keberhasilan petani dengan produksi beras nasional yang bagus musim ini harus dijaga dan diapresiasi, petani harus diberikan reward pada level produksi. Harga yang bagus pada GKP dan GKG dan beras membuat petani senang, puncak kebahagiaan petani.

“Beras petani memiliki kualitas yang premium aslinya, enak dan cocok dengan lidah orang Indonesia umumnya. Harga dipasaran juga masih terjangkau pada level konsumen” tambah Riyono.

Fenomena beras oplosan akhir - akhir ini menunjukkan bahwa konsolidasi tata kelola perberasan nasional kita masih lemah. Peredaran beras negara belum mampu menjaganya dengan baik.

“Beras yang beredar dipasar bebas itu per bulan 2,5 juta ton untuk kebutuhan

konsumsi masyarakat. Negara melalui Bulog hanya bisa menyediakan kurang lebih 5% atau 0.1 juta ton dan sisanya 2.4 juta itu dikuasai oleh swasta. Artinya tata kelola beras dikendalikan oleh swasta, rawan akan penyimpangan seperti oplosan dan juga penyelundupan” papar Riyono.

Waktunya negara hadir sepenuhnya, beras harus dikendalikan oleh negara dari hulu sampai hilir. Swasta tetap hidup dan berkontribusi dengan menyediakan beras khusus untuk masyarakat dengan program sosial seperti SPHP.

“Negara baru berperan di 5% dipasar beras, harusnya minimal 20% atau bahkan 50% untuk memastikan bahwa tata niaga dipegang dan dikendalikan oleh negara” tegas Riyono.

Satgas pangan akan kewalahan dan tetap akan ada saja praktik curang dalam bisnis beras. Kehadiran secara regulasi dan hadirnya BUMN pangan yang kuat akan menjadi solusi bagi keamanan pangan rakyat.



image istimewa

## Abdul Hadi Harap Kecelakaan KMP Tak Terulang, Desak Kementerian Perhubungan Benahi Tata Kelola Penyeberangan Laut

Banyuwangi (23/07) — Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menyampaikan keprihatinan mendalam saat meninjau langsung lokasi pascakecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali.

Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Banyuwangi, ia menegaskan bahwa tragedi ini adalah peringatan keras bagi semua pihak, khususnya Kementerian Perhubungan, untuk segera membenahi tata kelola penyeberangan laut secara menyeluruh dan sistemik sesuai dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya cita keempat.

"Mewujudkan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah", serta cita kelima: "Meningkatkan kualitas hidup rakyat dan memperluas perlindungan sosial."

Menurut Abdul Hadi, insiden tenggelamnya kapal di Selat Bali bukanlah peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Ia menyebut bahwa kecelakaan demi kecelakaan yang terus berulang, seperti kasus KMP Yunicee pada 2021 dan kebakaran KM Barcelona V baru-baru ini di Sulawesi Utara, mencerminkan lemahnya pengawasan, minimnya prosedur keselamatan, dan buruknya disiplin administratif di sektor pelayaran nasional. Ketika manifest penumpang tidak akurat, ketika tidak ada

pengarahan keselamatan kepada penumpang, dan ketika alarm kebakaran digantikan oleh teriakan panik sesama penumpang, maka ini adalah cerminan kegagalan sistem, bukan sekadar kesalahan individu.

Dalam tragedi KMP Tunu Pratama Jaya, Abdul Hadi menyoroti adanya ketidaksesuaian data manifest dengan kenyataan di lapangan. Beberapa korban tidak tercatat dalam daftar penumpang resmi. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur bahwa seluruh penumpang dan barang wajib tercatat dalam manifest sebelum keberangkatan.

Ketidaksesuaian ini tidak hanya menyulitkan proses evakuasi dan identifikasi, tetapi juga berpotensi menyembunyikan kelebihan muatan dan memperbesar risiko kecelakaan.

Lebih lanjut, Abdul Hadi menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap para pemangku kepentingan di sektor pelayaran. Ia menyayangkan bahwa

## Abdul Hadi Harap Kecelakaan KMP Tak Terulang, Desak Kementerian Perhubungan Benahi Tata Kelola Penyelenggaraan Laut

### « SEBELUMNYA

selama ini, ketika kecelakaan terjadi, tanggung jawab hanya dibebankan kepada nakhoda kapal, sementara peran penting regulator—terutama syahbandar yang menerbitkan Surat Peretujuan Berlayar (SPB)—seringkali luput dari pengawasan dan akuntabilitas hukum.

Padahal, syahbandar bertugas memastikan bahwa kapal memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan sebelum diberangkatkan. Kecelakaan seperti ini seharusnya menjadi momen evaluasi menyeluruh terhadap fungsi dan integritas

lembaga pengawasan pelayaran.

Abdul Hadi juga mengkritisi ketiadaan prosedur keselamatan dasar di atas kapal. Tidak adanya pengarahan keselamatan atau simulasi evakuasi, serta minimnya akses terhadap alat keselamatan seperti pelampung dan sekoci, menjadi penyebab utama kepanikan dan korban jiwa.

Ia menyampaikan bahwa di lapangan, banyak penumpang selamat hanya karena secara kebetulan menemukan jaket pelampung yang tercecer di laut, bukan karena sistem keselamatan yang berjalan



image istimewa

sebagaimana mestinya.

Dalam konteks perlindungan korban, Abdul Hadi menegaskan bahwa negara harus hadir secara penuh. Ia meminta agar keluarga korban yang meninggal dunia, luka-luka, maupun kehilangan harta benda, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam manifes, mendapatkan hak ganti rugi yang setimpal.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 137 ayat (2) dalam UU No. 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran, yang menjamin hak ahli waris penumpang terhadap kompensasi meskipun korban tidak tercatat dalam manifes.

Di akhir pernyataannya, Abdul Hadi menyerukan perlunya reformasi total dalam sistem pelayaran nasional, khususnya pada sektor penyelenggaraan yang melibatkan kapal-kapal rakyat dan kapal feri. Ia mendesak Kementerian Perhubungan untuk memperkuat sistem digitalisasi manifes, mewajibkan prosedur safety induction sebelum pelayaran, serta melakukan inspeksi berkala terhadap kelaikan kapal.

Ia juga meminta Mahkamah Pelayaran menjalankan fungsinya secara penuh untuk menindak tegas pihak-pihak yang lalai, baik operator, perwira kapal, maupun pejabat pelabuhan.

“Kita tidak boleh membiarkan nyawa rakyat terus menjadi korban akibat kelalaian yang



insiden tenggelamnya kapal di Selat Bali bukanlah peristiwa tunggal yang berdiri sendiri. Ia menyebut bahwa kecelakaan demi kecelakaan yang terus berulang, seperti kasus KMP Yunicee pada 2021 dan kebakaran KM Barcelona V baru-baru ini di Sulawesi Utara, mencerminkan lemahnya pengawasan, minimnya prosedur keselamatan, dan buruknya disiplin administratif di sektor pelayaran nasional.

### **ABDUL HADI, S.E., M.M.**

Anggota Komisi V DPR RI

terus berulang. Setiap kecelakaan harus menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar catatan musiman.

Negara harus hadir, tegas, dan adil dalam menegakkan keselamatan pelayaran,” tutup Abdul Hadi.

Tragedi Laut Harus Dihentikan,

## Aleg PKS Saadiah Desak Pemerintah Perkuat Keselamatan Transportasi Laut

Jakarta (21/07) — Insiden tragis kembali terjadi di perairan Indonesia. Kapal Motor (KM) Barcelona 5 terbakar di sekitar Pulau Taliase, Minahasa Utara, memaksa para penumpang melompat ke laut demi menyelamatkan diri.

Kengerian di tengah lautan itu menjadi pemicu betapa ruginya keselamatan transportasi laut di negeri kepulauan ini.

Menyikapi kejadian tersebut, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mendesak langkah nyata dari pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keselamatan pelayaran.

Sebagai Wakil Rakyat dari daerah kepulauan Maluku, Saadiah merasakan kedukaan dan kepedihan para korban yang mengalami langsung ketakutan di tengah kobaran api dan hampasan ombak.

Ia menyampaikan empati

dan doa untuk seluruh penumpang, awak kapal, serta keluarga yang terdampak atas musibah ini.

Menurut politisi PKS ini, setiap kejadian kecelakaan laut jangan dijadikan catatan angka statistik saja, tapi mesti dijadikan evaluasi mendalam akan tragedi kemanusiaan yang mencerminkan kegagalan sistem pengawasan dan perawatan moda transportasi laut.

"Ketika penumpang harus melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dari kapal yang terbakar, itu menandakan ada yang sangat keliru dalam sistem kita," ujar Saadiah.

Legislator yang kini bermit-

ra dengan Kementerian Perhubungan ini meminta agar Kementerian ini dan seluruh otoritas terkait untuk mengevaluasi total sistem kelayakan kapal, perizinan pelayaran, serta kesiapan darurat di setiap rute transportasi laut.

Saadiah juga mendesak agar Badan SAR Nasional dan instansi terkait segera memberikan pertolongan maksimal kepada para korban, agar semua penumpang dapat ditemukan.

Saadiah juga memohon agar bantuan medis, dan dukungan psikologis dapat segera diturunkan. Ia berharap kejadian ini tidak menjadi berita musiman yang cepat dilupakan, tetapi menjadi momentum perubahan menuju sistem pelayaran yang lebih profesional dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat di daerah kepulauan.

"Kita tidak bisa terus membiarkan warga di daerah terpencil bertarung nyawa demi bepergian atau berdagang lewat laut. Negara harus hadir dengan menjamin keselamatan warganya," tegas Saadiah.

Melalui insiden ini, Saadiah Uluputty menyampaikan untuk terus mengawal isu keselamatan transportasi laut di parlemen.

"Saya berharap, akan selalu ada sinergi semua pihak agar tragedi serupa tak lagi terulang, dan laut Indonesia benar-benar menjadi jalan kehidupan, bukan ladang bencana," tutup Saadiah Uluputty.



Setiap kejadian kecelakaan laut jangan dijadikan catatan angka statistik saja, tapi mesti dijadikan evaluasi mendalam akan tragedi kemanusiaan yang mencerminkan kegagalan sistem pengawasan dan perawatan moda transportasi laut. Ketika penumpang harus melompat ke laut untuk menyelamatkan diri dari kapal yang terbakar, itu menandakan ada yang sangat keliru dalam sistem kita,"

**SAADIAH ULUPUTTY, S.T**

Anggota Komisi V DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kreatif Atraktif Substantif*



Bersatu Berdaulat  
Rakyat Sejahtera  
Indonesia Maju

# Gerakan Serentak Pasang Bendera Merah Putih

1 s.d 31 Agustus 2025



Image istimewa

## Serukan Tangkal Beras Oplosan, Anggota FPKS Nevi Minta Kemendag Lebih Sering Sidak

Jakarta (25/07) — Meski Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai wilayah dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, kenyataannya masih ditemukan peredaran beras oplosan yang mencederai konsumen.

Pemerintah melalui inspeksi di 10 provinsi pada Juli 2025 mengungkap bahwa 85–90 persen sampel beras tidak sesuai dengan standar mutu, label harga, dan volume kemasan.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap temuan tersebut.

“Ini bukan hanya soal konsumen yang dirugikan. Dampaknya jauh lebih luas, hingga ke petani dan pedagang kecil. Ketika publik kehilangan kepercayaan pada beras lokal, maka seluruh ekosistem pangan ikut terdampak,

### Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

“Ini bukan hanya soal konsumen yang dirugikan. Dampaknya jauh lebih luas, hingga ke petani dan pedagang kecil. Ketika publik kehilangan kepercayaan pada beras lokal, maka seluruh ekosistem pangan ikut terdampak,” ujar legislator asal Sumatera Barat II ini.

Menurut Nevi, peringatan dini seharusnya sudah muncul sejak Januari 2025, ketika harga beras di pasaran melonjak, sementara harga gabah justru menurun.

“Ini sinyal adanya praktik curang di lapangan yang gagal dibaca oleh Kementerian Perdagangan. Ada celah serius dalam sistem pemantauan harga dan distribusi pangan,” tegasnya.

Politisi PKS ini juga mengingatkan bahwa praktik menjual beras oplosan adalah pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Pasal 8 UU No. 8 Tahun

1999 jelas melarang penjualan barang yang tidak sesuai standar. Ancaman pidananya bisa sampai lima tahun penjara atau denda dua miliar rupiah,” imbuhnya.

Sebagai solusi, Nevi mendorong penguatan peran koperasi desa seperti Kopdes Merah Putih.

“Koperasi ini bisa menjadi garda depan dalam membina petani menghasilkan gabah berkualitas, memastikan transparansi label kemasan, dan menggandeng pemerintah desa dalam pengawasan distribusi. Ini cara konkret mencegah beras oplosan,” ungkapnya.

“Saya berharap, semua elemen bergerak bersama, Asa Cita keenam Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan nasional bisa terwujud dengan lebih cepat dan kokoh,” tutup Nevi Zuairina.



## Dorong UMKM Naik Kelas, Hendry Munief Minta BSN Permudah Akses Sertifikasi

Jakarta, (17/07) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, yang juga merupakan Anggota Komisi VII, mendorong Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam proses sertifikasi produk

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama BSN dan sejumlah Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang digelar hari ini, Rabu (17/07).

Menurut politisi Fraksi PKS tersebut, proses sertifikasi seperti SNI, PIRT, BPOM, hingga sertifikasi halal masih menjadi tantangan besar bagi para pelaku UMKM. Padahal, kemudahan akses terhadap sertifikasi merupakan syarat penting agar produk mereka bisa bersaing dan masuk ke pasar modern.

“Bagaimana mungkin UMKM bisa tumbuh dan berkembang kalau proses sertifikasinya saja masih rumit? Banyak yang terhambat hanya karena tidak punya BPOM, sertifikasi halal, atau SNI,” ujarnya.

Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar LPK saat ini justru lebih fokus pada perusahaan besar, sementara kebutuhan UMKM belum mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, dengan jumlah pelaku UMKM mencapai

sektor UMKM,” sambung anggota Komisi VII tersebut.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya laporan dari pelaku UMKM yang belum mendapatkan sertifikasi meski telah mengajukan sejak tahun 2022. Legislator asal PKS itu menekankan perlunya perbaikan dari sisi waktu dan mekanisme, agar sertifikasi tidak lagi menjadi hambatan yang menghalangi UMKM untuk berkembang.

“Saya berharap BSN dan LPK punya program yang betul-betul berpihak dan responsif. Jangan sampai yang kecil makin tertinggal hanya karena proses birokrasi yang berbelit,” pungkasnya.

Proses sertifikasi seperti SNI, PIRT, BPOM, hingga sertifikasi halal masih menjadi tantangan besar bagi para pelaku UMKM. Padahal, kemudahan akses terhadap sertifikasi merupakan syarat penting agar produk mereka bisa bersaing dan masuk ke pasar modern.

**H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.**

Anggota Komisi VII DPR RI



Soroti Tingginya Marketing  
Fee E-Commerce,

## Alifudin Desak Regulasi Demi Lindungi UMKM

Jakarta (25/07) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat I, Alifudin, menyoroti tingginya beban marketing fee yang dikenakan oleh sejumlah platform e-commerce besar seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan TikTok Shop terhadap para pelaku UMKM.

la menyebutkan, biaya pemasaran yang mencapai 9 hingga 12 persen tersebut sangat memberatkan dan berdampak langsung terhadap harga jual produk lokal.

Menurut Alifudin, besarnya potongan dari platform digital ini membuat pelaku UMKM terpaksa menaikkan harga produk mereka demi menutupi biaya operasional, yang pada akhirnya menurunkan daya saing terhadap produk impor yang lebih murah.

"Ini jelas merugikan UMKM kita. Saat pelaku lokal harus

membayar biaya tinggi, produk impor justru masuk dengan harga rendah dan tanpa beban tambahan," ujarnya.

Politisi Fraksi PKS itu menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan karena akan menghambat pertumbuhan sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya di daerah seperti Kalimantan Barat.

la mengingatkan bahwa peran negara sangat penting dalam menciptakan ekosistem digital yang adil dan mendo-

kung produk dalam negeri.

Untuk itu, Alifudin mendorong Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kemen-UMKM) agar segera merumuskan regulasi baru yang mengatur besaran marketing fee secara wajar dan berpihak pada pelaku UMKM.

"Harus ada batasan yang jelas. Negara tidak boleh kalah oleh algoritma dan sistem platform digital asing yang tak berpihak pada kepentingan nasional," tegasnya.

Alifudin juga mengusulkan agar pemerintah membuka ruang negosiasi dengan penyedia platform untuk memberikan skema khusus bagi pelaku UMKM, seperti potongan biaya, promosi bersubsidi, atau kemitraan jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak.

"UMKM butuh dukungan nyata, bukan hanya seremonial. Kalau kita ingin UMKM naik kelas, biayanya jangan terus memberatkan," tambahnya.

Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Barat, Alifudin berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi pelaku UMKM di parlemen, termasuk dalam penyusunan regulasi yang berpihak pada sektor usaha kecil dan menengah.

"UMKM lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal kedaulatan ekonomi bangsa," tutupnya.



“UMKM butuh dukungan nyata, bukan hanya seremonial. Kalau kita ingin UMKM naik kelas, biayanya jangan terus memberatkan,”

**H. ALIFUDIN, S.E., M.M**

Anggota Komisi VII DPR RI



# HNW : Evaluasi Haji dan Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat jadi Fokus Komisi VIII Dimasa Sidang ini

Jakarta (15/07) — Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menegaskan dalam masa sidang di DPR kali ini, yang terpenting adalah pembahasan dua isu strategis dalam rapat kerja dengan mitra komisi VIII

yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Haji. Hal ini disampaikan dalam kegiatan PKS Legislative Report.

Menurut Hidayat, dua isu utama yang menjadi perhatian adalah evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan beserta revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan realisasi program Sekolah Rakyat yang digulirkan oleh Kementerian Sosial atas perintah Presiden Prabowo.

Ia menyebut, kedua hal ini menjadi perhatian Komisi 8 dan

memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, sehingga perlu pengawasan dan perhatian khusus dari DPR RI.

"Ada dua yang paling utama dibahas oleh Komisi 8 dalam masa sidang kali ini. Dengan Kementerian Sosial, kita membahas mengenai realisasi program Sekolah Rakyat, dan dengan Kementerian Agama serta Badan Penyelenggara Haji, kita fokus pada evaluasi program haji serta revisi undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh"ujarnya.

Terkait penyelenggaraan

haji, Hidayat menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi pelayanan, manajemen kuota, hingga persoalan biaya. Ia berharap hasil evaluasi ini bisa menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh yang tengah digodok bersama pemerintah.

"Kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih baik dan transparan, serta berpihak kepada kepentingan jamaah," tegasnya.

Sementara itu, terkait program Sekolah Rakyat, Hidayat mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo yg pelaksanaannya dikomandoi oleh Kementerian Sosial dalam memperluas akses pendidikan masyarakat.

Namun, ia juga mendorong agar program ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mampu menjangkau kelompok rentan dan meningkatkan kualitas pendidikan berbasis pemberdayaan sosial untuk memotong lingkaran setan kemiskinan.

"Program ini harus dikawal dengan baik agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Melalui rapat ini, Hidayat menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga mitra kerja, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, sosial, dan keagamaan.



"Nusuk seharusnya bisa dibagikan di Indonesia, jangan semua dibagikan di Saudi. Masalah tanazul juga harus dikomunikasikan dengan baik agar jamaah tidak jadi korban kebijakan yang berubah-ubah,

**Dr. H.M. HIDAYAT  
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Agar semua kementerian dapat melaksanakan amanah dan tugasnya dengan yang lebih

baik untuk kemaslahatan umat, rakyat dan Negara," tutupnya



# Miris! Puluhan Bayi Dijual ke Luar Negeri, PKS Serukan Penguatan Perlindungan Ibu dan Anak

Jakarta (17/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani mengemukakan keras praktik keji perdagangan bayi yang diungkap Polda Jawa Barat.

"Adanya praktik kejahatan kemanusiaan ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan terhadap bayi, ibu rentan, dan perempuan yang mengalami tekanan sosial maupun ekonomi. Negara harus menyelesaikan persoalan ini secara tuntas dan tidak boleh ada pengabaian," ujar Netty dalam pernyataan resminya, Rabu (16/7/2025)

Dalam kasus tersebut, terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp.11 juta hingga Rp16 juta.

"Praktik keji ini merupakan puncak gunung es dari berbagai persoalan struktural seperti kemiskinan, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi, lemahnya perlindungan sosial bagi ibu hamil di luar nikah, dan celah hukum yang dimanfaatkan oleh

pelaku sindikat TPPO," imbuh Ketua DPP PKS Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas ini.

"Ketika perempuan hamil dalam kondisi rentan, entah akibat tekanan ekonomi, kekerasan seksual, atau ditinggalkan pasangan, sementara dirinya tidak mendapat perlindungan dan pilihan hidup yang aman, maka mereka sangat mudah untuk dimanipulasi menjadi target empuk jaringan perdagangan manusia," jelasnya.

Oleh karenanya, Netty meminta pemerintah agar menguatkan sistem deteksi dini dan pelacakan terhadap praktik adopsi ilegal dan jual-beli bayi.

"Perluas layanan perlindungan sosial dan shelter aman bagi perempuan hamil tanpa dukungan, termasuk remaja putri yang menjadi korban kekerasan seksual," katanya.

"Berikan edukasi kesehatan

an reproduksi dan perlindungan hukum kepada perempuan dan keluarga, terutama di daerah-daerah miskin dan padat penduduk," tambahnya.

Selain itu, kata Netty, pemerintah perlu melibatkan masyarakat sipil, ormas, dan lembaga keagamaan dalam memberikan pendampingan moral dan psikososial bagi ibu dan anak yang rentan.

"Negara harus hadir, bukan hanya menindak setelah kejahatan terjadi, tapi mencegah sejak awal dengan pendekatan perlindungan dan pemberdayaan," tegasnya.

Netty menegaskan bahwa PKS melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas akan terus mendorong hal-hal. Pertama, akan terus melanjutkan advokasi kebijakan perlindungan ibu dan anak.

"Kedua, mendorong peningkatan anggaran layanan sosial di daerah-daerah dengan angka kemiskinan tinggi," ujar Netty.

Ketiga, imbuhnya, mengedukasi dan menggerakkan peran kader-kader PKS di berbagai



pemerintah perlu melibatkan masyarakat sipil, ormas, dan lembaga keagamaan dalam memberikan pendampingan moral dan psikososial bagi ibu dan anak yang rentan. Negara harus hadir, bukan hanya menindak setelah kejahatan terjadi, tapi mencegah sejak awal dengan pendekatan perlindungan dan pemberdayaan,"

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

wilayah untuk menjadi mata dan telinga deteksi dini kasus-kasus TPPO.

"Anak bukan komoditas. Ia adalah amanah dan masa

depan bangsa. Negara harus menjamin hidup dan martabat setiap bayi Indonesia, sejak dalam kandungan hingga tumbuh dewasa," pungkasnya.



image istimewa

## Dorong Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Gaya Hidup Sehat, Aleg PKS Ru'yat : Hidup Sehat adalah Hak Warga

Jakarta (15/07) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V, Achmad Ru'yat, menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan gratis dan gaya hidup sehat sebagai hak dasar masyarakat.

la menyampaikan hal ini dalam program PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam wawancaranya, Anggota Komisi IX DPR RI tersebut menyatakan dukungannya terhadap

program unggulan Kementerian Kesehatan RI yang mendorong masyarakat melakukan cek kesehatan gratis, terutama bertepatan dengan hari ulang tahun masing-masing warga. Program ini, menurutnya, merupakan implementasi dari arahan Menteri Kesehatan dan sejalan dengan semangat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

"Pemeriksaan kesehatan gratis adalah langkah preventif yang sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap warga dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya," tegas Achmad. Achmad Ru'yat juga menyoroti perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat.

Menurutnya, keberhasilan GERMAS sangat bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat serta dukungan infrastruktur kesehatan yang merata, termasuk di daerah

seperti Kabupaten Bogor yang ia wakili.

"Pola hidup sehat dimulai dari lingkungan yang bersih, sanitasi yang layak, dan akses mudah terhadap layanan kesehatan. Ini harus dijadikan budaya baru kita," ujar Ru'yat.

Achmad Ru'yat meminta agar program-program tersebut tidak hanya menjadi seremonial, tetapi diikuti dengan peningkatan pelayanan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menyukseskan program kesehatan nasional demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya.

"Cek kesehatan gratis bukan sekadar program. Ini adalah bentuk kepedulian negara terhadap rakyatnya. Hidup sehat adalah hak setiap warga negara," tutupnya.

"Pola hidup sehat dimulai dari lingkungan yang bersih, sanitasi yang layak, dan akses mudah terhadap layanan kesehatan. Ini harus dijadikan budaya baru kita,

**drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI



image istimewa

## Aleg PKS Fikri Faqih Soroti Ketiadaan 'Blueprint' dan Rencana Induk Pendidikan Ditengah Revisi UU Sisdiknas

Jakarta (17/07) — Sebuah ironi besar tengah membayangi dunia pendidikan Indonesia. Di saat negara-negara tetangga yang dahulu menimba ilmu dari sistem pendidikan Indonesia kini melesat maju dengan cetak biru yang jelas, Indonesia justru dinilai berjalan di tempat tanpa peta jalan yang pasti.

Kritik juga mengemuka di tengah proses krusial revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 yang ditargetkan rampung pada tahun 2025.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa akar persoalannya bukanlah sekadar pasal-pasal usang, melainkan ketiadaan sebuah rencana induk (grand design) sebagai kompas pendidikan jangka panjang.

"Yang menjadi catatan kami adalah adalah kita belum punya blueprint atau cetak birunya belum punya rencana induk," ujar Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/7/2025)

Menurutnya, pembaruan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang telah berusia 22 tahun memang mendasak.

Revisi ini sendiri berfokus pada sejumlah aspek vital, seperti pengembangan kompetensi guru, pembaruan kurikulum

agar relevan dengan dunia kerja, hingga sistem penerimaan mahasiswa baru.

Namun, Fikri mengingatkan, semua upaya teknis itu tidak akan cukup tanpa visi besar yang terstruktur. "Saya kira kita sudah telah jauh," tegasnya.

Fikri juga menyayangkan bagaimana sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki rencana induk, sementara pendidikan yang menjadi fondasi bangsa justru tidak.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membandingkan kondisi Indonesia dengan negara tetangga yang kini lebih terarah.

"Negara-negara tetangga kita itu, yang dulu belajar ke Indonesia, mereka sudah punya blueprint. Bahkan ada yang memakai kurikulum kita tahun 1974 sebagai acuan. Kenapa mereka bagus? Karena arahnya jelas," papar legislator dari

## Aleg PKS Fikri Faqih Soroti Ketiadaan 'Blueprint' dan Rencana Induk Pendidikan Ditengah Revisi UU Sisdiknas

### « SEBELUMNYA

daerah pemilihan (dapil) IX Jawa Tengah (Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kab Brebes) ini.

Arah yang jelas itu, lanjutnya, tecermin dari porsi yang seimbang antara pendidikan vokasi, akademik, dan profesi.

Ketiadaan arah di Indonesia, menurutnya, telah memicu masalah turunan, seperti fenomena saling menyalahkan saat lulusan Sekolah Menengah Ke-

juruan (SMK) dituding menjadi penyumbang pengangguran terbesar.

"Itu terjadi karena memang arah pendidikan kita tidak ditentukan dulu," sorot Fikri.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa momentum revisi UU Sisdiknas harus dimanfaatkan untuk memasukkan klausul yang mewajibkan (mandatory) penyusunan Rencana Induk Pendidikan Nasional.

Rencana tersebut harus

visioner dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) menuju Indonesia Emas 2045.

"Kemarin menteri yang lalu (Nadiem Makarim) membuat peta jalan untuk 15 tahun. Padahal RPJP kita 20 sampai 25 tahun. Peta jalan yang 15 tahun saja belum tentu selesai, apalagi jika tidak disesuaikan dengan visi besar negara," pungkasnya.

Sebagai informasi, Komisi X DPR RI menargetkan revisi UU Sisdiknas rampung dilakukan pada tahun 2025 ini.

Revisi UU Sisdiknas merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

Revisi UU Sisdiknas merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Melalui revisi Undang-Undang Sisdiknas, peningkatan akses dan kualitas pendidikan akan menjadi prioritas utama pemerintah.

Adapun beberapa aspek yang menjadi fokus dalam revisi tersebut di antaranya meliputi pengembangan kompetensi guru, serta pembaruan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Revisi UU Sisdiknas merupakan bagian dari upaya besar mewujudkan sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan harapan masyarakat. Aspek lain seperti penerimaan mahasiswa baru, juga turut menjadi pembahasan dalam revisi UU itu.



“Negara-negara tetangga kita itu, yang dulu belajar ke Indonesia, mereka sudah punya blueprint. Bahkan ada yang memakai kurikulum kita tahun 1974 sebagai acuan. Kenapa mereka bagus? Karena arahnya jelas,”

**Dr. H. ABDUL  
FIKRI FAQIH, MM**

Anggota Ketua Komisi X DPR RI





## Aleg PKS Reni Astuti Pastikan MPLS Ciptakan Kegembiraan dan Jangjan Sampai Ada Anak Tidak Bisa Sekolah

Jakarta (15/7) – Memasuki hari kedua tahun ajaran baru, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, M.PSDM, menyoroti pentingnya pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang positif

dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mengakses pendidikan. Hal ini disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan.

Reni menekankan bahwa hari pertama sekolah seharusnya menjadi momen yang penuh kegembiraan bagi para siswa dan orang tua, terutama bagi mereka yang baru memasuki jenjang pendidikan baru di kelas 1, 7, dan 10. Menurutny, MPLS memegang peranan krusial dalam menciptakan kesan pertama yang positif terhadap lingkungan sekolah.

"Tentu harapannya kegiatan MPLS ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus-menerus memastikan bahwa semua kegiatan MPLS di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia berjalan dengan baik. Membawa keceriaan, membawa kegembiraan, semakin membuat semangat belajar, dan memberikan kenyamanan," ujar Reni.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya MPLS sebagai sarana untuk mencegah

perundungan (bullying). Selain kualitas pelaksanaan MPLS, Reni memberikan perhatian khusus pada isu krusial lainnya, yaitu masih adanya anak-anak yang belum mendapatkan sekolah hingga saat ini. Ia mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah untuk proaktif menyelesaikan masalah ini.

"Yang paling penting juga adalah harus dipastikan, saya mendorong kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah jangan sampai ada hingga saat ini, ketika semakin banyak anak yang datang ke sekolah, tapi ada anak yang nggak bisa sekolah. Ini yang

penting juga," kata Reni.

Sebagai bentuk tanggung jawabnya di daerah pemilihan (Dapil), Legislator PKS ini secara aktif membuka posko pengaduan bagi warga di Surabaya dan Sidoarjo yang anaknya belum mendapatkan sekolah, baik di jenjang SD, SMP, maupun SMA. Ia berkomitmen untuk membantu mencari solusi, termasuk mengarahkan ke sekolah swasta dengan bantuan biaya dari pemerintah, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau misalkan tidak bisa masuk di negeri, bisa masuk di swasta. Apalagi dengan keputusan MK, mereka yang tidak mampu harus tetap sekolah dengan biaya dibantu oleh pemerintah," pungkasnya.

Reni Astuti berharap evaluasi dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini dapat terus dilakukan untuk memastikan hak setiap anak atas pendidikan dapat terpenuhi tanpa terkecuali.

"Kalau misalkan tidak bisa masuk di negeri, bisa masuk di swasta. Apalagi dengan keputusan MK, mereka yang tidak mampu harus tetap sekolah dengan biaya dibantu oleh pemerintah,"

**RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.**

Anggota Komisi X DPR RI



Tanggal Lahir :  
17 Juli 1963



Dapil  
Jawa Tengah IX



Keluarga  
Istri : Zubaedah, SE  
Anak : 7 Cucu : 3



- Pendidikan**
- SMA Negeri 1 Slawi, Tegal, Jawa Tengah (1979-1982)
  - S1 Pendidikan Teknik Elektro, FPTK, IKIP Negeri Semarang (1987)
  - S2 Manajemen, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2002)
  - S3, Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro (2017)



- Pekerjaan**
- Guru Madrasah Aliyah NU Al Imam Adiwerna, Tegal (1986-1987)
  - Kepala STM Muhammadiyah Tegal, Jawa Tengah (1987-1993)
  - Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal (1999-2004)
  - Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah (2004-2009)
  - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (2009-2014)
  - Anggota DPR RI (2014-2017), (2019-2024), (2024-2029)
  - Wakil Ketua Komisi X DPR RI (2017-2024)



- Riwayat Organisasi**
- Wakil Ketua Pengurus Daerah (PD) Pelajar Islam Indonesia (PJI) Tegal
  - Ketua Ikatan Remaja Masjid Al Huda Semarang
  - Pembina Yayasan Pertiwi Tegal
  - Ketua Majelis Amanah Mathlaul Anwar Jateng
  - Wakil Ketua Pengurus Wilayah (PW) PII Jateng
  - Ketua DPD PK Kabupaten Tegal (1998-1999)
  - Ketua Daerah Dakwah Lima DPW PKS Jateng (2000-2004)
  - Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Jateng (2004-2009)
  - Sekretaris Wilda Jatijaya DPP PKS
  - Ketua Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Provinsi Jateng (2009-2014)
  - Ketua DPW PKS Jateng (2010-2015) (2018-2020)
  - Ketua BPW Jatijaya DPP PKS (2020-2025)



Dr.

# Abdul Fikri Faqih

MM

#### Publikasi Buku

- Menuju Green Budgeting (2018)
- Benang Kusut Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Di Indonesia (2019)
- Kebangkitan Ekraf Dari Regulasi (2022)
- Darurat Literasi Indonesia :
- Urgensi Reformulasi Sinergi dan Kolaborasi (2023)



#### Penghargaan

- Guru Teladan III Kota Tegal Dinas Pendidikan Kota 1988
- REDD+ academy Programme for Parliamentarians Held, Yogyakarta (2014)
- Best Legislator Award (2014)
- Anugerah Alumni Berprestasi UNNES (2017)



#### Sosial Media

- X : Fikrifaqih
- Instagram / Tiktok : Afikrifaqih
- Facebook : Fikri Faqih
- Youtube : Abdul Fikri Faqih





image istimewa

## Komisi XI FPKS Amin Ak: Penurunan Suku Bunga BI Perlu Didukung Stimulus Fiskal yang Lebih Berani

Jakarta (18/07) --- Bank Indonesia akhirnya mengambil langkah tepat dengan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% pekan ini. Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, mengapresiasi langkah BI yang mulai merespons sinyal pelemahan ekonomi.

Namun, di tengah lesunya daya beli masyarakat dan ancaman resesi global, langkah ini baru seperti segayung air di ladang yang kering.

"Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja.

Data BPS terbaru menunjukkan penjualan mobil anjlok 18%, pertumbuhan kredit konsumen merosot ke level terendah dalam tiga tahun, sementara 60% pelaku UMKM mengeluhkan kesulitan akses pembiayaan. Yang lebih memprihatinkan, survei terbaru mencatat 12% keluarga kelas menengah kita kini kesulitan memenuhi kebutuhan pokok," bebarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengaku memahami kekhawatiran BI terkait stabilitas rupiah dan inflasi. Namun, justru di saat inflasi inti berada di level rendah 2,37% inilah kita harus lebih berani bertindak.

Ia mencontohkan pengalaman Thailand pada awal 2024 yang patut menjadi pelajaran. Mereka berhasil keluar dari resesi dengan kombinasi penurunan suku bunga dan stimulus

fiskal besar-besaran senilai 2%-3% dari PDB.

4 Pada awal 2024, Thailand sempat terancam resesi akibat kontraksi ekonomi dan tingginya utang rumah tangga (~88% PDB). Namun, kuartal I 2025 Thailand mencatat pertumbuhan +1,5% yoy. Pemerintah Thailand merespons dengan program 'Digital Wallet' senilai 500 miliar baht (2,7% PDB), dengan memberi 10.000 baht kepada jutaan warga untuk mendorong konsumsi.

Bank Dunia mencatat program ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Thailand sebesar 0,5-1,6 poin persentase terhadap GDP. Bank of Thailand juga memangkas suku bunga 25 bps menjadi 2,25% pada Oktober 2024, untuk meringankan beban kredit dan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah tekanan konsumsi dan pinjaman.

"Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tidak mengalami kondisi separah Thailand.

## Komisi XI FPKS Amin Ak: Penurunan Suku Bunga BI Perlu Didukung Stimulus Fiskal yang Lebih Berani

### « SEBELUMNYA

Namun pemerintah tetap perlu menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegahnya," ujarnya.

Amin pun menyodorkan tiga langkah konkret kebijakan yang bisa diambil. Pertama, pemerintah perlu segera meluncurkan paket stimulus fiskal yang menasar langsung akar masalah. Bukan sekadar insentif sektoral, tapi bantuan nyata berupa subsidi BBM un-

tuk angkutan umum, keringanan PPh 0% untuk UMKM, dan program bantuan pangan beras untuk 18,27 juta keluarga paling rentan.

Kedua, BI perlu mendorong perbankan lebih agresif menyalurkan kredit produktif. Sudah waktunya suku bunga KUR diturunkan di bawah 5%, dengan persyaratan yang lebih manusiawi bagi usaha mikro. Jangan sampai kebijakan moneter longgar justru hanya meng-



untungkan korporasi besar.

Ketiga, Indonesia butuh te-robosan di sisi ketenagakerjaan.

Kenaikan UMP 2025 yang hanya 3,2%—di bawah inflasi riil—telah membuat upah pekerja tergerus. Inflasi riil adalah tingkat inflasi aktual yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itu merujuk pada kenaikan harga kebutuhan pokok yang paling berdampak langsung pada masyarakat, seperti harga beras, tarif listrik dan transportasi, dan biaya sekolah dan kesehatan.

Pemerintah harus mempertimbangkan skema insentif khusus bagi perusahaan yang mempertahankan lapangan kerja.

"Kabar baiknya, kita punya ruang gerak. Rasio utang yang masih di bawah 40% PDB dan cadangan devisa sebesar USD 152,5 miliar memberi kita modal cukup untuk bertindak. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian politik untuk mengambil langkah-langkah besar," ungkapnya.

Amin mengaku siap mendukung segala kebijakan progresif melalui fungsi anggaran dan pengawasan di DPR.

"Momentum pemulihan ini tidak boleh disia-siakan, sebelum jendela kesempatan tertutup dan ekonomi kita terjebak dalam stagnasi berkepanjangan," pungkasnya.



BI perlu mendorong perbankan lebih agresif menyalurkan kredit produktif. Sudah waktunya suku bunga KUR diturunkan di bawah 5%, dengan persyaratan yang lebih manusiawi bagi usaha mikro. Jangan sampai kebijakan moneter longgar justru hanya menguntungkan korporasi besar.

**AMIN AK,M.M.**

Anggota Komisi XI DPR RI



image istimewa

## Komisi XI FPKS Idrus Salim Aljufri Puji Komunikasi dan Lobi Brilian Pemerintah Tekan Tarif AS Jadi 19%

Jakarta (16/07) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Idrus Salim Aljufri, menyampaikan apresiasi yang tinggi

atas keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia dalam merespons rencana pengenaan tarif tinggi oleh Amerika Serikat.

Melalui komunikasi dan lobi yang efektif, Indonesia ber-

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan mitra strategis lainnya yang telah bekerja keras melakukan pendekatan dan diplomasi ekonomi secara elegan dan berdaulat,”

**HABIB IDRUS SALIM ALJUFRI, Lc., M.B.A.**

Anggota Komisi XI DPR RI

hasil menurunkan pengenaan tarif dari semula direncanakan 32% menjadi 19%.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan mitra strategis lainnya yang telah bekerja keras melakukan pendekatan dan diplomasi ekonomi secara elegan dan berdaulat,” ujar Idrus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Idrus menilai capaian ini merupakan bukti bahwa Indonesia mampu memperjuangkan kepentingan nasional di tengah tekanan ekonomi global, sekaligus menjaga stabilitas ekspor dan menjaga keberlanjutan industri dalam negeri.

“Tarif 19% tentu masih menjadi tantangan, namun jauh lebih ringan dibandingkan skenario awal 32% yang berpotensi

menekan kinerja ekspor nasional dan lapangan kerja. Ini adalah bentuk keberhasilan mitigasi risiko perdagangan melalui diplomasi ekonomi yang cerdas,” tambahnya.

Politisi dari Daerah Pemilihan Banten 3 ini juga mendorong agar capaian ini menjadi momentum untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kerangka ekonomi global, serta mendorong diversifikasi pasar ekspor non-tradisional dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

“Kita butuh strategi jangka panjang agar ketergantungan terhadap satu pasar bisa dikurangi, sekaligus memperkuat daya saing melalui hilirisasi, inovasi, dan integrasi UMKM ke rantai pasok global,” tutupnya.



image istimewa

## Soroti Sedikitnya Peringkat Emas dalam Proper, Ateng Sutisna Apresiasi Tata Kelola Lingkungan MIND ID

Jakarta (21/07) --- Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ateng Sutisna, menyampaikan apresiasi terhadap upaya tata kelola lingkungan yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan tambang di bawah naungan Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Direksi MIND ID dan anak usahanya, seperti PT Aneka Tambang Tbk. (Antam), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Timah Tbk., PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Vale Indonesia, dan PT Freeport Indonesia.

Dalam rapat tersebut, MIND ID memaparkan capaian masing-masing perusahaan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, termasuk hasil Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang menjadi tolok ukur penting komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.

"PROPER bukan sekadar alat ukur teknis, tetapi juga merupakan instrumen transparansi publik yang kuat. Lewat sistem peringkat warna, publik dapat menilai sejauh mana keseriusan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan," tegas Ateng.

Ateng menekankan bahwa

tujuan utama PROPER adalah mendorong perusahaan melampaui kepatuhan minimum (beyond compliance) dan terus berinovasi dalam praktik keberlanjutan. Selain menjadi insentif reputasi, capaian PROPER juga berdampak terhadap relasi perusahaan dengan masyarakat, regulator, serta membuka peluang pembiayaan hijau.

Merujuk pada penilaian PROPER tahun 2023-2024, Ateng memaparkan bahwa: - PT Antam memperoleh 2 PROPER Emas dan 1 Hijau, termasuk Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Nikel Maluku.; - PT Bukit Asam meraih 2 Emas dan 1 Hijau dari Unit Dermaga Kertapati.; - PT Inalum mencatatkan PROPER Emas pada Unit PLTA Paritohan.; - PT Vale Indonesia juga meraih PROPER Emas untuk unit pertambangan nikel terintegrasi.; - Sementara PT Timah, dari 10 unit yang dinilai, mendapatkan 1 PROPER Emas, 4 Hijau, dan 5 Biru.

BERIKUTNYA >>>



## Soroti Sedikitnya Peringkat Emas dalam Proper, Ateng Sutisna Apresiasi Tata Kelola Lingkungan MIND ID

### ◀ SEBELUMNYA

Terkait PT Freeport Indonesia, Ateng mengungkapkan keheranannya mengingat belum terlihat partisipasi perusahaan tersebut dalam penilaian PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

“Saya sendiri pernah berkunjung ke lokasi Freeport beberapa waktu lalu saat masih bertugas di Komisi II, dan saat itu saya melihat mereka memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang cukup baik.

Namun, mengapa hingga kini belum terlihat partisipasi mereka dalam program PROPER? Ini penting untuk dijelaskan secara terbuka, apakah memang sedang dalam proses pengajuan atau ada kendala administratif lainnya,” ujar Ateng.

Meski mengapresiasi capaian sejumlah unit usaha, Ateng juga menekankan bahwa masih banyak unit perusahaan yang hanya meraih PROPER Biru atau Hijau. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan serius dari holding BUMN tambang

tersebut.

“Saya mendorong MIND ID untuk tidak hanya berfokus pada capaian emas, tetapi juga memperbaiki unit-unit yang masih belum optimal. Kita perlu konsistensi, bukan hanya prestasi di sebagian kecil unit,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Ateng menyerukan agar KLH dapat memastikan seluruh perusahaan tambang besar, termasuk Freeport, terlibat aktif dalam mekanisme PROPER secara menyeluruh.

“Transparansi dan keberlanjutan harus menjadi prinsip utama industri ekstraktif di Indonesia. DPR akan terus mengawal hal ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan generasi masa depan,” pungkasnya.



image istimewa



“Saya mendorong MIND ID untuk tidak hanya berfokus pada capaian emas, tetapi juga memperbaiki unit-unit yang masih belum optimal. Kita perlu konsistensi, bukan hanya prestasi di sebagian kecil unit,”

**Ir. H. ATENG SUTISNA**

Anggota Komisi XII DPR RI



## Tinjau TPS3R Nitikan, Anggota FPKS Meitri: Inovasi Pengolahan Sampah RDF Perlu Maksimal!

Jakarta (21/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meitri Citra Wardani bersama anggota Komisi XII melakukan kunjungan spesifik (kunsfik) ke Tempat Pengolahan Sampah, TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) Nitikan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta (19/07).

Meitri mengatakan Nitikan merupakan salah satu unit pengolahan sampah berbasis masyarakat yang telah beroperasi sejak tahun 2022.

"Unit ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Setiap hari, unit ini menangani hingga 75 ton sampah dari wilayah sekitarnya," ungkapnya

Bukan hanya memilah sampah, lanjutnya, Nitikan juga menjadi salah satu tempat untuk bisa mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif,

atau Refuse Derived Fuel (RDF) yang berasal dari sampah organik berkalori tinggi, terutama plastik dan kertas yang tidak bisa didaur ulang.

Meitri, menyampaikan apresiasinya terkait dengan adanya RDF yang telah dihadirkan di TPS3R Nitikan ini.

"Inovasi RDF di TPS3R Nitikan merupakan hal yang potensial dalam pengolahan sampah di masyarakat. Terutama sampah yang sulit didaur ulang seperti plastik, hasilnya bahkan bisa menjadi alternatif bahan bakar dengan inovasi RDF ini," ujarnya,

Meitri juga melihat langsung proses RDF di TPS3R Nitikan, mulai dari sampah organik ringan yang telah dipilah dimasukkan ke conveyor belt untuk disortir kembali, kemudian dicacah menggunakan mesin penghancur (crusher), dan digiling menjadi serpihan kecil oleh mesin RDF.

"Hasilnya konversi sampah residu menjadi bahan bakar yang dapat digunakan di sektor industri, khususnya pabrik semen," ujarnya.

Namun dalam peninjauan tersebut, Meitri menyampaikan beberapa hal yang perlu di evaluasi oleh Pemerintah Provinsi DIY, Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PLSB3) Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH RI yang juga membersamai Kunjungan ke TPS3R Nitikan.

"Beberapa hal yang perlu disoroti pertama, terkait dengan proses yang masih dilakukan secara manual terutama memilah sampahnya masih menggunakan tenaga manusia, yang seharusnya bisa mendapatkan investasi dari APBD untuk menerapkan sistem sortir semi-otomatis atau sensorik. Kedua, terkait dengan perawatan rutin yang harus dilakukan agar tidak terulang downtime yang terjadi di September 2024 lalu, agar RDF bisa bekerja maksimal mengolah sampah yang menyalah saat ini baru bisa menyatunya 60 ton sampah," paparnya.



Nitikan merupakan salah satu unit pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah beroperasi sejak tahun 2022. Unit ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Setiap hari, unit ini menangani hingga 75 ton sampah dari wilayah sekitarnya,"

**Hj. MEITRI CITRA WARDANI, S.H.**

Anggota Komisi XII DPR RI



Soroti Lonjakan Harga Minyak  
Akibat Gejolak Timur Tengah,

## Aleg PKS Dorong Ketahanan Energi dan Akselerasi Transisi

Jakarta (12/07) — Lonjakan tajam harga minyak mentah Indonesia yang kini menembus US\$ 69,33 per barel akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, Ak.

Jalal menyampaikan keprihatinannya atas dampak gejolak global terhadap stabilitas energi nasional dan mendesak pemerintah untuk memperkuat kebijakan strategis di sektor energi.

“Fluktuasi tajam harga minyak akibat konflik di Timur Tengah menegaskan betapa rapuhnya ketahanan energi kita jika terus bergantung pada dinamika global. Ini harus menjadi peringatan sekaligus momentum untuk mempercepat transformasi energi nasional,” ujar Jalal dalam keterangannya di Jakarta.

Menurutnya, Indonesia

harus segera mengakselerasi peningkatan produksi migas nasional (lifting) sebagai langkah jangka pendek untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga ketahanan pasokan.

Ia juga mendorong SKK Migas dan kontraktor migas untuk bekerja lebih agresif meningkatkan target produksi, terlebih menjelang pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dalam jangka menengah, Haji Jalal menekankan pentingnya penguatan infrastruktur

energi, termasuk percepatan pembangunan kilang dalam negeri dan optimalisasi distribusi BBM.

“Kunjungan kami ke Fuel Terminal Cikampek beberapa waktu lalu menunjukkan pentingnya pengawasan distribusi energi. Sistem seperti Terminal Automation System (TAS) harus diperluas ke wilayah strategis lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, legislator dari Dapil Jawa Barat VII ini mengapresiasi program transisi energi berbasis komunitas seperti Desa Energi Berdikari (DEB) yang dinilai mampu menjawab tantangan energi sekaligus memberdayakan masyarakat desa.

Ia mendorong agar program-program semacam ini diadopsi secara nasional sebagai bagian dari roadmap transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Jalal juga mengingatkan pemerintah agar mewaspadai lonjakan beban subsidi energi akibat kenaikan harga minyak global. Ia menilai perlu ada evaluasi terhadap skema subsidi agar tidak membebani APBN, namun tetap menjaga daya beli masyarakat.

“Pemerintah dan DPR harus duduk bersama merumuskan langkah-langkah konkret. Kita tidak bisa lagi bersikap reaktif. Harus ada strategi jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian dan keadilan energi,” tegasnya.



“Fluktuasi tajam harga minyak akibat konflik di Timur Tengah menegaskan betapa rapuhnya ketahanan energi kita jika terus bergantung pada dinamika global. Ini harus menjadi peringatan sekaligus momentum untuk mempercepat transformasi energi nasional,”

### **H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.**

Anggota Komisi XII DPR RI

Sebagai penutup, Jalal menekankan bahwa situasi ini bukan hanya soal harga minyak, tapi juga tentang kedaulatan energi nasional.

“Saatnya Indonesia menata ulang orientasi energinya,

dari bergantung pada pasar global menjadi negara yang kuat secara produksi, adil dalam distribusi, dan tangguh dalam menghadapi krisis,” pungkasnya.



image istimewa

## Komisi XIII FPKS Yanuar Arif: LPSK Harus Proaktif Kawal Kasus Meninggalnya Diplomat Kemenlu

Jakarta (20/07) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Menurut Yanuar, atensi masyarakat terhadap kasus ini cukup tinggi lantaran muncul sejumlah indikasi kejanggalan yang hingga kini masih terus dialami oleh pihak kepolisian.

“Jangan sampai ada pembiaran. Bila ada saksi yang memiliki informasi penting terkait kematian diplomat tersebut, mereka harus diberi perlindungan maksimal. LPSK tidak boleh menunggu permintaan, tapi bisa jemput bola dalam situasi tertentu yang mengandung potensi ancaman,”

### **H. YANUAR ARIF WIBOWO, S.H.**

Anggota Komisi XIII DPR RI

Selain itu, perhatian publik juga tertuju pada latar belakang pekerjaan almarhum dan kasus-kasus sensitif yang pernah ia tangani sebagai diplomat.

“Kita tentu menghormati proses penyelidikan yang sedang berjalan oleh pihak berwenang. Namun, dalam konteks perlindungan terhadap para saksi, LPSK harus bergerak lebih awal dan aktif,” ujar Yanuar di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ia menegaskan, potensi adanya saksi kunci dalam kasus ini sangat mungkin, dan mereka bisa saja menghadapi tekanan atau ancaman tertentu. Dalam konteks ini, kehadiran LPSK menjadi sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para saksi dalam memberikan keterangan.

“Jangan sampai ada pembiaran. Bila ada saksi yang memiliki informasi penting

terkait kematian diplomat tersebut, mereka harus diberi perlindungan maksimal. LPSK tidak boleh menunggu permintaan, tapi bisa jemput bola dalam situasi tertentu yang mengandung potensi ancaman,” imbuhnya.

Yanuar juga mengajak publik untuk terus mengawal kasus ini secara kritis namun tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Ia berharap pengungkapan kasus ini dapat dilakukan secara transparan dan tuntas agar tidak menimbulkan spekulasi liar yang dapat merusak citra lembaga maupun merugikan pihak-pihak tertentu.

“Kita percaya pada kerja aparat penegak hukum, tetapi dalam sistem hukum yang sehat, perlindungan terhadap saksi adalah bagian penting dari keadilan itu sendiri,” tutupnya.

# PROGRAM UNGGULAN

## FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kecanggih, Atorokij, Substantif*

**Parlementaria** ( Diskusi Publik,  
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,  
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.

# Kecam Serangan Israel ke Suriah, BKSAP DPR RI FPKS Mardani Ali Sera: Ancaman bagi Stabilitas Kawasan

Jakarta (17/07) — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyatakan kecaman keras atas serangan udara yang dilancarkan Israel ke sejumlah fasilitas penting di Damaskus, Suriah.

Serangan udara ini menyasar gedung Staf Umum, Kementerian Pertahanan, serta area di sekitar Istana Kepresidenan Suriah.

Serangan ini menargetkan jantung pemerintahan Suriah yang seharusnya dilindungi sebagai objek sipil dalam situasi damai maupun konflik.

Menurut Kementerian Kesehatan Suriah, sembilan orang dilaporkan terluka akibat serangan yang terjadi pada Rabu sore, 16 Juli 2025 waktu setempat.

Tindakan ini memicu kecamasan serius di kalangan masyarakat internasional karena berpotensi memicu ketegangan baru di kawasan, sekaligus memperburuk krisis kemanusiaan yang telah lama berlangsung di Suriah.

Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan Israel yang semakin memperburuk instabilitas di kawasan Timur Tengah.

"Menyerang pusat pemerintahan suatu negara berdaulat, termasuk istana presiden merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan hukum internasional. Aksi ini jelas memperbesar risiko konflik terbuka dan memicu ketegangan baru di kawasan," tegas Anggota DPR RI dari Jakarta Timur.

Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, secara terbuka mengklaim bahwa serangan tersebut merupakan 'serangan yang menyakitkan' terhadap Damaskus dan menyatakan bahwa Israel akan meningkatkan inten-

sitas serangan di Suriah.

Ia bahkan mengancam bahwa wilayah selatan Suriah akan dijadikan zona demiliterisasi secara sepihak oleh Israel.

Sebelumnya, Israel juga mengeluarkan ancaman terhadap Suriah terkait kehadiran militer Suriah di Kota Sweida wilayah berpenduduk mayoritas Druze.

Israel menuntut pasukan pemerintahan Suriah mundur dari wilayah tersebut dan mengancam akan melanjutkan serangan militer jika permintaan itu tidak dipenuhi. Pemerintah Suriah menuding Israel sebagai pihak yang mengkhianati stabilitas kawasan dengan terus melakukan intervensi militer yang mengabaikan kedaulatan negara lain.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan bahwa kelompok bersenjata ilegal telah melakukan serangan terhadap pasukan pemerintah di beberapa wilayah kota, yang menurut mereka melanggar perjanjian gencatan senjata yang sebelumnya disepakati.



"Sebagai bagian dari diplomasi parlemen, BKSAP akan memanfaatkan forum-forum internasional untuk menyuarakan penghentian kekerasan, menegakkan prinsip kedaulatan negara, serta memastikan bahwa hukum internasional, khususnya hukum humaniter, ditegakkan tanpa pandang bulu,

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**  
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI

BKSAP DPR RI menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian damai atas konflik di Suriah dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.

"Sebagai bagian dari diplomasi parlemen, BKSAP akan memanfaatkan forum-forum

internasional untuk menyuarakan penghentian kekerasan, menegakkan prinsip kedaulatan negara, serta memastikan bahwa hukum internasional, khususnya hukum humaniter, ditegakkan tanpa pandang bulu," ungkap Mardani.



Soroti Ketimpangan Tata Ruang dan Konflik Agraria di Kawasan Hutan

## Muh Haris: Negara Harus Hadir untuk Masyarakat

Jakarta (23/07) --- Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Muh Haris, menegaskan pentingnya penataan ulang tata ruang dan penyelesaian konflik agraria yang melibatkan ribuan desa yang secara administratif berada di dalam kawasan hutan negara

Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Desa Masuk Kawasan Hutan: Menata Ulang Tata Ruang dan Keadilan Agraria' yang digelar BAM DPR RI di Jakarta, 22-23 Juli 2025.

Menurut Haris, konflik agraria yang terjadi akibat tumpang tindih antara kawasan hutan dan pemukiman masyarakat merupakan bom waktu yang harus segera diselesaikan negara.

"Ada lebih dari 20.000 desa yang masuk dalam kawasan hutan. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi menyangkut nasib jutaan rakyat, keadilan agraria, dan keberlanjutan lingkungan," ujarnya.

Haris menyoroti kasus di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau, di mana ribuan masyarakat—termasuk transmigran dan penduduk lokal—terancam tegusur akibat penertiban kawasan pasca terbitnya Perpres No. 5 Tahun 2025.

"Kita tidak bisa bicara penertiban semata tanpa menyelesaikan akar persoalan tata batas, kepemilikan legal

seperti SHM, hingga akses pendidikan dan kesehatan yang juga ikut terdampak," jelasnya.

Selain itu, Haris juga menyinggung persoalan serupa di Desa Sukawangi, Bogor, yang telah eksis sejak 1950-an namun diklaim sebagai bagian dari kawasan hutan Hambalang Barat.

"Ini ironis. Negara sendiri yang menetapkan desa, membangun sekolah, puskesmas, lalu tiba-tiba menganggap wilayah tersebut hutan negara. Ketidaksielarasan antar instansi pusat dan daerah inilah yang

memperkeruh konflik," tegasnya.

Sebagai anggota legislatif, Haris menekankan peran pengawasan DPR dalam memastikan negara tidak semena-mena terhadap rakyatnya. Ia mendorong agar rekomendasi dari FGD ini ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang adil dan implementatif.

"Negara hukum harus hadir dengan melindungi rakyatnya, bukan justru membuat rakyat hidup dalam ketidakpastian," tutup Haris.

FGD ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Desa, ATR/BPN, Kemenakertrans, Komnas HAM, WALHI, hingga perwakilan masyarakat terdampak.

Diharapkan, forum ini menjadi pijakan konkret dalam membangun tata ruang yang berpihak kepada keadilan sosial dan lingkungan berkelanjutan.

"Ini ironis. Negara sendiri yang menetapkan desa, membangun sekolah, puskesmas, lalu tiba-tiba menganggap wilayah tersebut hutan negara. Ketidaksielarasan antar instansi pusat dan daerah inilah yang memperkeruh konflik,"

**Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.**

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI

## Wakil Ketua BAKN DPR FPKS, Amin Ak: BAKN Siap Kawal Ketat Tindak Lanjut Temuan BPK yang Berdampak ke Publik

Jakarta (23/07) — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin Ak, menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya pada isu-isu strategis yang berdampak langsung pada tata kelola negara dan pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Amin usai pelantikan dirinya sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (22/07/2025).

"Alhamdulillah, saya bersyukur atas amanah ini. Ke depan, BAKN akan fokus pada pengawasan temuan BPK yang bersifat lintas kementerian dan lintas sektor (*cross cutting*). Jangan sampai ada rekomendasi BPK yang dibiarkan berlarut-larut

tanpa penyelesaian," tegas Amin.

Beberapa temuan BPK yang menjadi perhatian BAKN antara lain pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan data kesejahteraan sosial, belanja operasional BUMN, hingga tata kelola aset di sektor hulu migas.

Amin menekankan bahwa seluruh temuan tersebut meny-

angkut langsung kepentingan rakyat dan integritas keuangan negara.

Dalam upaya memperkuat tindak lanjut, BAKN akan meningkatkan koordinasi dengan komisi-komisi terkait di DPR RI.

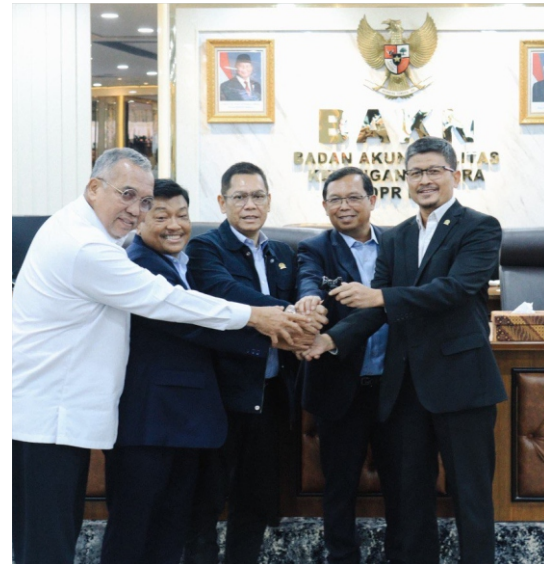
"Jika dalam 60 hari tindak lanjut belum dilakukan, BAKN akan mengundang komisi terkait untuk menentukan langkah lanjutan. Ini bentuk penguatan akuntabilitas dan disiplin anggaran," ujarnya.

BAKN juga mendorong keterbukaan informasi kepada publik. Amin menyampaikan bahwa laporan-laporan hasil telaahan BAKN yang relevan akan disajikan secara ringkas dan komunikatif agar mudah diakses masyarakat.

"Kami juga akan meningkatkan pelibatan masyarakat sipil dalam proses pengawasan anggaran," tambahnya.

Menutup keterangannya, Amin Ak menyampaikan pesan kepada kementerian/lembaga dan BUMN agar menjalankan anggaran dengan penuh tanggung jawab.

"Temuan BPK bukan sekadar catatan administratif, tapi cermin tata kelola. Rekomendasi harus ditindaklanjuti, karena ini menyangkut kepercayaan rakyat terhadap negara", pungkasnya.



"Alhamdulillah, saya bersyukur atas amanah ini. Ke depan, BAKN akan fokus pada pengawasan temuan BPK yang bersifat lintas kementerian dan lintas sektor (*cross cutting*). Jangan sampai ada rekomendasi BPK yang dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian,"

**AMIN AK, M.M.**

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas  
Keuangan Negara (BAKN) DPR RI



image istimewa

## Anak Petani dari Brebes Lolos Empat Universitas Top AS, Fikri Faqih: Bukti Anak Daerah Punya Kesempatan Setara

Brebes (17/07) — Kegigihan dan kerja keras telah mengantarkan Maulida Azzahra, seorang siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Brebes, meraih prestasi gemilang di tingkat internasional.

Putri dari Saepudin dan Khotimah keluarga petani di Desa Jati Makmur, Kecamatan Songgom, ini berhasil diterima di empat universitas terkemuka di Amerika Serikat, sebuah pencapaian yang menjadi inspirasi dan bukti nyata bahwa kesempatan mengenyam pendidikan kelas dunia terbuka bagi siapa saja.

Kisah inspiratif gadis yang akrab disapa Zahra ini mendapat apresiasi tinggi dari Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, yang mengunjunginya langsung, baru-baru ini.

Menurut Fikri, keberhasilan Zahra membantah stigma bahwa pendidikan berkualitas hanya milik kalangan tertentu dan menegaskan bahwa anak-anak dari daerah, bahkan dari latar belakang sederhana, memiliki peluang yang setara.

"Ini menjadi inspirasi dan dorongan bagi kita semua, bahwa anak Madrasah Aliyah pun bisa. Anak-anak di penjuru Indonesia punya kesempatan yang sama untuk belajar di manapun asalkan bersungguhsungguh," ujar Fikri, dalam keterangannya, Selasa (15/07/2025).

Siswi kelas XII jurusan IPA ini diterima di Brown University, New York University (NYU), University of Pennsylvania, dan Princeton University.

Dari keempatnya, Zahra memutuskan untuk mengambil program studi Bisnis dan Ekonomi Politik di New York University (Stern School of Business) yang dinilai paling sejalan dengan minat dan visinya.

Perjalanan Zahra tidaklah mudah. Ia mempersiapkan seluruh proses pendaftaran, mulai dari penulisan esai hingga kelengkapan dokumen pendukung, secara mandiri dalam bahasa Inggris. Kemampuan berbahasa asing itu ia asah secara tekun sejak duduk di bangku Madrasah Tsanawiyah (Mts).

"Awalnya saya hanya ingin melanjutkan S2 ke luar negeri, tetapi kakak saya memotivasi untuk mencoba mendaftar S1," ungkap Maulida, menceritakan awal mula keberaniannya mendaftar ke total 15 universitas di luar negeri.

Fikri secara khusus menyoroti mentalitas pantang menyerah yang ditunjukkan Zahra.

## Anak Petani dari Brebes Lolos Empat Universitas Top AS, Fikri Faqih: Bukti Anak Daerah Punya Kesempatan Setara

### « SEBELUMNYA

Fakta bahwa Zahra tidak lolos saat mendaftar di perguruan tinggi dalam negeri namun tidak patah arang justru menjadi pesan kuat bagi generasi muda lainnya.

“Anak-anak di sini kadang putus asa jika tidak diterima di kampus dalam negeri. Kisah Maulida Azzhra ini

membuktikan bahwa itu bukan masalah,” tegas Fikri.

Lebih lanjut, politisi yang akrab disapa Fikri ini menyatakan bahwa pencapaian Zahra turut mengangkat citra Kabupaten Brebes, yang pernah berada di peringkat terakhir Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah.

Keberhasilan Zahra juga didukung penuh oleh pemerin-

tah melalui program Beasiswa Garuda dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikristek).

Hal ini, menurut Fikri, menunjukkan komitmen negara dalam mendukung talenta-talenta muda dari seluruh pelosok negeri.

“Saya berharap Maulida dapat menjadi contoh nyata bagi anak-anak Indonesia lainnya, dan ilmu yang didapatnya kelak bisa bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bangsa,” pungkas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini.



keberhasilan Zahra membantah stigma bahwa pendidikan berkualitas hanya milik kalangan tertentu dan menegaskan bahwa anak-anak dari daerah, bahkan dari latar belakang sederhana, memiliki peluang yang setara. Ini menjadi inspirasi dan dorongan bagi kita semua, bahwa anak Madrasah Aliyah pun bisa. Anak-anak di penjuru Indonesia punya kesempatan yang sama untuk belajar di manapun asalkan bersungguh-sungguh,”

**Dr. H. ABDUL  
FIKRI FAQIH, MM**

Anggota Ketua Komisi X DPR RI



## Silaturahmi PKS dengan Presiden Prabowo

Pimpinan PKS Silaturahmi ke Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Rombongan Pimpinan PKS diantaranya, Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Sekretaris Jendral DPP PKS M Kholid, Bendahara Umum DPP PKS Noerhadi, Ketua Fraksi PKS DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, dan Kepala KSP PKS Pipin Sopian.



image istimewa

## Kembali Gelar Program Kacamata dan Alat Bantu Dengar Gratis, Habib Idrus Tegaskan Dewan Harus Hadir dan Bermanfaat

Tangerang (17/07) --- Komitmen untuk terus hadir dan bermanfaat bagi rakyat kembali dibuktikan oleh Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Banten III, Habib Idrus Salim A-ljufri, melalui kegiatan pemberian kacamata baca dan alat bantu dengar secara gratis kepada warga di Kabupaten Tangerang.

Program ini dilaksanakan dalam rangka Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) dan digelar di tiga titik berbeda, yakni Kecamatan Sepatan, Pakuhaji, dan Teluknaga.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari ini disambut hangat oleh warga, relawan, dan pengurus PKS di masing-masing titik.

"Dewan itu tidak boleh menjauh dari rakyat. Kami hadir bukan hanya saat kampanye, tapi dalam pelayanan yang konkret dan berkelanjutan," tegas Habib Idrus.

Kegiatan dimulai di Markas Sehati Relawan Habib Idrus, yang berlokasi di Jl. Raya Pakuhaji RT 04 RW 03, Kecamatan Sepatan. Acara ini dihadiri oleh relawan Sehati dari berbagai kecamatan, tokoh masyarakat, dan warga sekitar.

Ketua Relawan Sehati, Abdul Aziz, menyampaikan apresiasi kepada Habib Idrus atas kepeduliannya kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas pendengaran.

Dalam sesi tanya jawab, warga menyampaikan harapan agar kegiatan seperti ini bisa terus diperluas ke wilayah lain melalui jejaring relawan.

Selanjutnya, tim bergerak ke kantor DPC PKS Pakuhaji di Desa Kiara Payung, Kecamatan Pakuhaji. Dihadiri oleh Ketua DPC PKS Pakuhaji, Masudin, serta para kader dan tokoh masyarakat, kegiatan berlangsung dengan penuh antusias.

Dalam sambutannya, Masudin menekankan bahwa program ini adalah bukti bahwa Habib Idrus tidak melupakan konstituennya dan tetap aktif menyalurkan kebermanfaatannya di luar masa kampanye.

Tim Habib Idrus dalam kesempatan itu juga memperkenalkan rencana peluncuran Habib Idrus Academy, sebuah program pemberdayaan masyarakat berbasis pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan pengembangan SDM, yang akan segera digulirkan untuk menjawab tantangan ketenaga-

## Kembali Gelar Program Kacamata dan Alat Bantu Dengar Gratis, Habib Idrus Tegaskan Dewan Harus Hadir dan Bermanfaat

### « SEBELUMNYA

kerjaan dan ekonomi keluarga.

Titik terakhir kegiatan bertempat di kantor DPC PKS Teluknaga, Desa Rawa Lini, yang dihadiri oleh Ketua DPC PKS Teluknaga Zaenudin, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Bapak Sapri, serta para pengurus dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Zaenudin menyampaikan harapan agar program-program dari Habib Idrus dapat menjadi inspirasi bagi anggota dewan di tingkat daerah, terutama dalam memenuhi langsung kebutuhan

rakyat.

Dalam kesempatan itu, kembali ditekankan bahwa Habib Idrus Academy akan menjadi wadah pelatihan yang berorientasi pada solusi, dengan fokus pada kelompok pemuda, ibu rumah tangga, dan pencari kerja yang membutuhkan keterampilan baru.

Program pemberian bantuan ini tidak hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga menjadi media efektif dalam menjangkau aspirasi warga secara langsung, mulai dari kebutuhan sosial dasar hingga masukan terhadap desain program-

program kerakyatan ke depan.

"Kami ingin agar kehadiran wakil rakyat tidak sekadar simbolik, tetapi terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari alat bantu kesehatan, hingga akses pelatihan kerja yang bisa mengubah masa depan keluarga," ujar Habib Idrus.

Dengan semangat 'Dewan Merakyat, Peduli, dan Hadir di Tengah Umat', kegiatan seperti ini akan terus digelar secara berkala di wilayah Tangerang Raya dan menjadi bukti nyata bahwa politik bisa hadir dalam bentuk pelayanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

"Setiap aspirasi warga, sekecil apa pun, adalah bahan bakar bagi kami untuk terus bekerja. Karena tugas dewan bukan hanya bicara di podium, tapi mendengar dan bergeraknya bersama rakyat," imbuhnya.



“Kami ingin agar kehadiran wakil rakyat tidak sekadar simbolik, tetapi terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari alat bantu kesehatan, hingga akses pelatihan kerja yang bisa mengubah masa depan keluarga,

**HABIB IDRUS SALIM  
ALJUFRI, Lc., M.B.A.**

Anggota Komisi XI DPR RI

# Gandeng BRIN, Anggota Komisi X DPR RI Buat Kegiatan Liburan Produktif

Bandung (15/07) --- Dalam mengisi liburan semester lalu, siswa-siswi level SMA dari Kota Bandung dan Cimahi punya alternatif kegiatan seru.

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuat kegiatan pelatihan bertema Liburan Produktif Bersama Bu Ledia dan BRIN.

"Kami bersama BRIN menyanggaja mencari satu bentuk kegiatan positif untuk mengisi liburan anak-anak sekolah. Kami mencari acara yang bermanfaat, bisa memberikan bekal kepada anak-anak sebelum mereka asuka mulai di tahun ajaran baru namun tetap menarik. Maka dipilihlah kegiatan pelatihan digital yang memang sedang menjadi tren di kalangan remaja," jelas Ledia

Acara yang berlangsung selama 3 hari pada 11 hingga 13 Juli 2025 itu mengusung tiga tema berbeda, pertama pelatihan editing video, kedua pemanfaatan AI untuk belajar

serta terakhir pembuatan konten media sosial. Kegiatan hari pertama dan ketiga bertempat di Aula ASM Ariyanti Pasir Kaliki, sementara kegiatan hari kedua dilangsungkan di Aula SMKN 3 Turangga, Bandung.

"Selama tiga hari kegiatan, total peserta pelatihan ini meliputi 300 siswa siswi setingkat SMA/SMK dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Jadi setiap hari itu hadir 100 peserta berbeda. Ini saja peminat yang ingin ikut sebenarnya lebih banyak tetapi keterbatasan yang ada membuat kami harus membatasi kuota peserta," lanjut Ledia

Mengapa pelatihan digital yang dipilih, menurut Ledia karena pada saat ini anak sekolah sudah terpapar internet sejak kecil. Daripada melarang anak-anak sekolah, jauh lebih bijak untuk mengarahkan mereka

bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang pembelajaran dan kehidupan yang lebih positif.

"Pada pelatihan memanfaatkan AI sebagai media pembelajaran misalnya, kami tidak sekedar melatih peserta untuk membuat AI tapi juga memberikan penjelasan, do and dont's nya penggunaan AI itu bagaimana. Apa yang boleh, apa yang terlarang, apa yang harus dihindari dan bagaimana menjadikan AI ini sebagai alat yang menunjang pembelajaran dan kehidupan, bukan menggantungkan pembelajaran dan pengetahuan pada AI," kata Sekretaris Fraksi PKS ini pula.

Begitu pula dalam pelatihan pembuatan konten media sosial, para siswa diberi pemahaman untuk selalu bijak dalam mengonsumsi dan memproduksi konten.

"Kami tekankan betul bahwa menghasilkan dan menyebarkan konten positif adalah semangat mendasar yang harus mereka pegang teguh. Jadi boleh bermedsos asalkan yang dikonsumsi, yang diproduksi, yang disebarluaskan adalah konten-konten positif," kata Ledia menegaskan

Tidak hanya mendengarkan pamateri, para peserta juga diajak berlatih dalam praktek. Dalam sesi pembuatan media sosial misalnya mereka dibuat kelompok dan diminta untuk membuat satu konten yang kemudian dipresentasikan di



"Kami tekankan betul bahwa menghasilkan dan menyebarkan konten positif adalah semangat mendasar yang harus mereka pegang teguh. Jadi boleh bermedsos asalkan yang dikonsumsi, yang diproduksi, yang disebarluaskan adalah konten-konten positif,"

**Hj. LEDIA HANIFA A,  
S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Komisi X DPR RI

hadapan peserta yang lain.

"Jadi mereka pun terlatih bekerja sama, bertukar ide dan mampu menjelaskan tentang hasil karya mereka di hadapan

rekan-rekan peserta yang lain. Ide-idenya unik dan suasana diskusinya pun seru dan menarik khas anak-anak remaja." tutup Ledia



image istimewa

## Salurkan Program TJSL, Jalal Abdul Nasir Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

Karawang (17/07) --- Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Dapil Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Bekasi.

Salah satu wujud nyatanya adalah penyaluran bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari mitra BUMN kepada masyarakat.

Dalam kesempatan ini, Jalal memfasilitasi penyaluran bantuan TJSL BUMN kepada 12 yasan yang tersebar di wilayah Karawang, Purwakarta, dan Bekasi.

“Program TJSL BUMN adalah bentuk konkret tanggung jawab sosial negara melalui korporasi milik negara. Kami ingin memastikan bantuan seperti ini bisa langsung menyentuh masyarakat, khususnya lembaga-lembaga sosial dan pendidikan di Karawang, Purwakarta, dan Bekasi,”

### H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.

Anggota Komisi XII DPR RI

Program ini merupakan hasil sinergi antara aspirasi masyarakat dengan kemitraan BUMN agar keberadaan perusahaan negara bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, terutama di sektor sosial dan pendidikan.

“Program TJSL BUMN adalah bentuk konkret tanggung jawab sosial negara melalui korporasi milik negara. Kami ingin memastikan bantuan seperti ini bisa langsung menyentuh masyarakat, khususnya lembaga-lembaga sosial dan pendidikan di Karawang, Purwakarta, dan Bekasi,” ujar Jalal Abdul Nasir dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri, produktif,

dan sejahtera.

Selain itu, Jalal juga berkomitmen terus membuka jalur komunikasi dengan masyarakat dan mitra BUMN agar program sosial seperti TJSL bisa terus berkelanjutan dan tepat sasaran.

Para penerima manfaat dari 12 yasan tersebut menyampaikan apresiasi atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat kegiatan sosial, pendidikan, dan pengembangan masyarakat di masing-masing yasan.

“Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara anggota legislatif, masyarakat, dan BUMN dalam membangun wilayah Karawang, Purwakarta, dan Bekasi secara berkelanjutan,” tutup Jalal.

# Netanyahu Bangun 'Kamp Konsentrasi' di Palestina, Aleg PKS Meity : Bentuk Pembersihan Etnik

Jakarta (18/07) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Meity Rahmatia menanggapi rencana pemerintahan garis keras pimpinan Benjamin Netanyahu di Israel yang berencana membangun pusat konsentrasi warga Palestina di Gaza yang disebutnya sebagai kota kemanusiaan.

Rencana Netanyahu tersebut, imbu Meity, disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, awal Juli 2025.

"Kota itu menurutnya akan didirikan di Gaza bagian selatan dan rencana membangun kurang lebih 600 ribu warga Palestina. Setiap orang yang ditampung kata Katz, akan diperiksa secara ketat agar tidak terkait dengan gerakan perlawanan bersenjata, Hamas," ungkapnya.

Menanggapi rencana ini, lanjut Meity, masyarakat di berbagai belahan dunia menyatakan penolakan keras. Ia menyampaikan keprihatinan atas

perkembangan kemanusiaan yang kian kritis itu di Gaza.

"Tindakan itu mendekati pelanggaran HAM yang dialami sendiri orang Yahudi selama perang dunia ke 2. Mereka digiring dan dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi oleh rezim Hitler," jelas Anggota Komisi XIII DPR RI ini.

Meity juga mengingatkan masyarakat Indonesia, terus mengikuti perkembangan di Palestina agar tetap peduli.

"Kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan hak asasi manusia. Komitmen ini dituangkan dalam UUD

1945. Kita harus tetap mendukung Palestina, dan jangan kehilangan moment atas peristiwa yang terjadi disana," terang Meity yang akhir-akhir ini banyak mengikuti isu HAM.

Tantangan terhadap rencana Netanyahu saat ini juga datang dari dalam Israel sendiri. Sejumlah tokoh Israel dan kelompok oposisi pada pemerintahan Netanyahu menyebut rencana ini tak lebih dari apa yang dialami orang-orang Yahudi di masa Hitler.

"Dengan berat hati saya katakan, ini semacam kamp konsentrasi," ungkap mantan perdana menteri Israel, Ehud Olmert pada Minggu (13/7/2025).

Ia menambahkan bahwa jika itu benar-benar dilakukan maka itu bentuk pembersihan etnis.

Hal serupa juga datang dari pimpinan oposisi di Israel, Yair Lapid. Politisi yang menjabat perdana menteri Israel pada tahun 2022 itu menyebut itu sebagai ide buruk.

"Itu adalah ide buruk dari semua sisi, keamanan, politik, ekonomi dan logistik. Saya sebenarnya tidak ingin menyebut itu kamp. Tapi kalau warga Palestina dilarang keluar dari tempat itu, maka itu kamp konsentrasi," terangnya.



"Kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan hak asasi manusia. Komitmen ini dituangkan dalam UUD 1945. Kita harus tetap mendukung Palestina, dan jangan kehilangan moment atas peristiwa yang terjadi disana,"

**Hj. MEITY RAHMATIA,**  
**S.Pd., S.E., M.M.**  
Anggota Komisi XIII DPR RI



## Bertemu Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Meitri: Perempuan Diranah Politik bukan Pemenuhan kuota!

Karawang (27/07) --- Dalam upaya memperkuat peran perempuan di panggung demokrasi, Meitri Citra Wardani, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Timur VIII, menekankan pentingnya strategi pemenangan yang terarah dan solid

di acara 'Seminar Politik', Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPPI) Kabupaten Karawang, yang turut dihadiri oleh berbagai organisasi perempuan lainnya,

Dalam paparannya, Meitri menyortir sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan untuk berkisah di ranah politik.

Budaya patriarki yang masih kuat, minimnya dukungan partai terhadap kader perempuan, pembiayaan kampanye yang timpang, kurangnya pelatihan, serta stigma bahwa politik 'bukan tempat perempuan' menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi bersama.

"Sejarah Indonesia tidak bisa ditulis tanpa wajah perempuan. Ada peran R.A Kartini, Cut

Nyak Dien, Dewi Sartika serta pahlawan Wanita kita lainnya di zaman sebelum kemerdekaan. Karena itu, kita harus terus memperjuangkan hak politik perempuan, bukan hanya sekadar pemenuhan angka kuota," tegas Meitri.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan mencapai minimal 30 persen.

"Namun, data KPU terbaru mencatat, dari total 576 anggota DPR RI periode 2024-2029, hanya 127 orang atau sekitar 21,9 persen yang merupakan perempuan. Walau belum mencapai 30% tetapi, jumlah ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Fraksi PKS

sendiri memiliki delapan anggota DPR RI perempuan dari total 50 anggota," ujar Meitri.

Dalam kesempatan ini, Meitri juga mendorong perempuan di berbagai bidang baik sebagai Ibu Rumah Tangga, Anggota Legislatif, Pejabat Eksekutif, maupun Yudikatif, untuk aktif berpartisipasi mendukung program pemerintah, serta berani mengambil peran strategis demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan kaum perempuan.

"Salah satu pondasi kuat strategi pemenangan perempuan dalam politik adalah membangun dan memperkuat jaringan. Bisa diawali dari peran ibu-ibu di masyarakat, sebagai Ibu RT/RW, Ibu PKK, Posyandu atau aktif di kegiatan social lainnya, seperti di KPPPI ini, maka disana kita membangun jaringan untuk nantinya kita juga dikenal dan belajar untuk semakin dekat dengan masyarakat," tambahnya.

Menurut Meitri, keterlibatan aktif perempuan bukan sekadar pemenuhan kuota, tetapi



"Salah satu pondasi kuat strategi pemenangan perempuan dalam politik adalah membangun dan memperkuat jaringan. Bisa diawali dari peran ibu-ibu di masyarakat, sebagai Ibu RT/RW, Ibu PKK, Posyandu atau aktif di kegiatan social lainnya, seperti di KPPPI ini, maka disana kita membangun jaringan untuk nantinya kita juga dikenal dan belajar untuk semakin dekat dengan masyarakat,"

**Hj. MEITRI CITRA WARDANI, S.H.**

Anggota Komisi XII DPR RI

juga penerapan peran strategis dalam merumuskan kebijakan

publik yang responsive terhadap kaum perempuan.



**Follow  
Akun tiktok  
Fraksi PKS DPR RI**

**@fraksipksdprri**



## Saadiah Uluputty Terima Ketua DPRD dan Wawali Tual, Soroti Ketimpangan Harga dan Akses Listrik di Maluku

Jakarta (18/07) -- Anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menerima kunjungan resmi Ketua DPRD Kota Tual, Hj. Aisyah Renhoat, dan Wakil Wali Kota Tual, Hi. Amir Rumra, di Kompleks Parlemen Senayan.

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis yang dihadapi masyarakat Tual, mulai dari ketimpangan harga kebutuhan pokok hingga persoalan akses listrik dan pengelolaan pascapanen.

Dalam keterangan persnya, Politisi PKS ini menilai bahwa pertemuan tersebut mencerminkan kegelisahan yang nyata dari masyarakat di daerah kepulauan seperti Tual.

Wakil Rakyat Indonesia Timur ini menyoroti persoalan harga kebutuhan pokok yang tinggi dan tidak merata akibat masih belum optimalnya distribusi logistik dan pemanfaatan jalur tol laut di wilayah tersebut.

"Tol laut perlu tersedia merata termasuk Pelabuhan Yos Sudarso. Sehingga di masa depan, dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitasi harga dan distribusi barang," ujar Saadiah, legislator dari Fraksi PKS itu.

Tak hanya soal pangan, Saadiah juga menyoroti keterbatasan akses listrik di sejumlah desa di Tual. Ia menegaskan bahwa ketimpangan akses energi di daerah kepulauan meru-

pakkan bentuk nyata dari ketidakadilan pembangunan yang harus segera diatasi oleh pemerintah pusat.

"Sampai hari ini, masih ada desa yang belum menikmati listrik. Ini menjadi ironi di tengah semangat pemerataan pembangunan nasional," tegasnya.

Persoalan lain yang juga diangkat adalah minimnya fasilitas pascapanen di sektor pertanian yang berdampak pada produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian masyarakat.

Saadiah menilai, penguatan sektor pertanian di Tual perlu ditunjang dengan infrastruk-

tur dan teknologi pascapanen yang memadai.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Saadiah menyatakan kesungguhannya, untuk mengawal dan mendorong aspirasi tersebut dalam pembahasan bersama kementerian teknis. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

Pertemuan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara wakil rakyat di pusat dan daerah untuk mengatasi kesenjangan dan mendorong keadilan pembangunan di wilayah kepulauan Maluku.

"Kami akan terus menyuarakan agar program-program pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa, tapi juga menyentuh daerah-daerah kepulauan seperti Tual yang selama ini kurang mendapatkan prioritas," tutup Saadiah Uluputty.

"Kami akan terus menyuarakan agar program-program pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa, tapi juga menyentuh daerah-daerah kepulauan seperti Tual yang selama ini kurang mendapatkan prioritas,"

**SAADIAH ULUPUTTY, S.T**

Anggota Komisi V DPR RI



## ARSI Bogor Raya dan Komunitas Peternakan Sampaikan Aspirasi Kesehatan dan Pertenakan ke DPR RI

Jakarta (22/07) — Dalam memperjuangkan hak masyarakat di bidang kesehatan dan peternakan, ARSI Bogor Raya bersama Komunitas Peternakan menggelar audiensi dengan Anggota Komisi IX DPR RI, H. Achmad Ru'yat, di Gedung Nusantara, Senayan

Pertemuan ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan aktual, termasuk kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KR-IS), sistem pembayaran paket diagnosis oleh BPJS, hingga revisi UU No. 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan.

Isu penerapan KRIS menjadi sorotan utama dalam audiensi. Berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan, implementasi KRIS yang sebelumnya dijadwalkan pada 25 Juni 2025 ditunda hingga Desember 2025

karena kesiapan fasilitas rumah sakit belum optimal.

Anggota Komisi IX menyampaikan, "Saya turun langsung ke lapangan, ke RSUD Cibinong dan RSUD Leuwiliang. Kami dapati pasien harus menunggu hingga 3-4 jam, dan waktu pelayanan masih lambat. Bahkan kamar rawat inap dikurangi dari 200 menjadi 180 karena penataan ulang ruang. Ini membuktikan bahwa banyak rumah sakit, terutama di daerah, belum siap menerapkan KRIS."

Terkait sistem baru pembayaran paket diagnosis, peralih-

an dari ID ARJ ke ID ARDI juga dinilai membingungkan. Rumah sakit, terutama swasta yang mandiri, mengalami kesulitan karena ketidakjelasan tarif yang dibagi berdasarkan kelas (1, 2, 3). Bahkan, BPJS Kesehatan tercatat menunda klaim pembayaran hingga 20% dari total tagihan, sehingga mengganggu operasional rumah sakit.

"Klaim dari rumah sakit sering dipending. Misalnya, diajukan Rp5 miliar, yang cair hanya Rp1 miliar. Saya sampaikan di forum, ini sangat memberatkan. Rumah sakit bisa kolaps kalau sistem ini tidak dibenahi," lanjut Achmad Ru'yat.

Beliau juga menekankan perlunya audit medis yang rasional dan tidak memberatkan, serta mendesak penggunaan data tunggal nasional untuk mendukung ketepatan sasaran program sosial dan kesehatan.

Dari sektor peternakan, Komunitas Peternakan menyuarakan perlunya revisi atau pembaruan terhadap UU No. 18 Tahun 2009 tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan, karena dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada peternak lokal. Mereka meminta agar program pemerintah di bidang peternakan tidak berhenti di atas kertas, namun benar-benar terlaksana secara efektif di lapangan.

"Revisi UU ini penting agar kran impor tidak mematikan peternak lokal. Program pemerintah harus dikawal agar tidak tersendat oleh regulasi



"Klaim dari rumah sakit sering dipending. Misalnya, diajukan Rp5 miliar, yang cair hanya Rp1 miliar. Saya sampaikan di forum, ini sangat memberatkan. Rumah sakit bisa kolaps kalau sistem ini tidak dibenahi,"

**drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan," ujar Anggota Komisi IX



## Kawal Kesejahteraan Dosen P3K, Aleg PKS: Negara Harus Hadir untuk Pemerataan Pendidikan di Daerah 3T

Jakarta (22/07) — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKS), Izzudin Al-Qassam Kasuba, dalam Agenda Aspirasi, di Ruang Pleno Fraksi DPR RI, menegaskan negara harus mementingkan kesejahteraan dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Disini kami akan mengawal kesejahteraan dosen P3K, karena bagaimanapun juga ini menyangkut hak. Mereka adalah bagian dari pilar pendidikan nasional, dan negara harus hadir memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan layak," ujar Al-Qassam.

Menurut Al-Qassam, kesejahteraan bagi dosen P3K merupakan aspek penting karena menyangkut masa depan Pendidikan di Indonesia. Terlebih, dalam hal ini terdapat kesenjangan pada dosen di

wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam Agenda Hari Aspirasi, (22/7), Izzudin juga mendorong agar Kementerian PAN-RB dan BKN untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan dosen P3K, agar tidak terjadi ketimpangan perlakuan antara dosen tetap dengan dosen P3K.

"Kami setuju untuk mendorong PAN-RB dan BKN agar dosen P3K mendapatkan perhatian lebih dan sejahtera," tegasnya.

Sebagai Langkah awal untuk mengawal isu ini, Al-Qassam berkomitmen untuk membawa pembahasan hari ini pada komisi terkait agar dapat dibahas pada rapat DPR RI dan dapat memberikan solusi yang tepat.

"Kami menyarankan agar dibuatkan kronologis lalu akan dibawakan pada saat rapat, agar aspirasi yang disampaikan bisa tersampaikan dan menemukan solusi," tambahnya.

Dalam hal ini juga Al-Qassam menekankan bahwa fraksi PKS konsisten memperjuangkan keadilan dalam sektor pendidikan, termasuk penguatan status, hak, dan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN seperti P3K.

"Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi soal keadilan dan masa depan pendidikan. Bila dosen tidak mendapatkan haknya secara layak, bagaimana kita bisa berharap lahir generasi unggul dari daerah-daerah pinggir?" Tambahnya.

Fraksi PKS akan terus mendorong kebijakan yang menjamin kesejahteraan dosen P3K secara nasional, dengan memperhatikan aspek keadilan, pemerataan, dan pengabdian mereka bagi kemajuan bangsa.



"Disini kami akan mengawal kesejahteraan dosen P3K, karena bagaimanapun juga ini menyangkut hak. Mereka adalah bagian dari pilar pendidikan nasional, dan negara harus hadir memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan layak,"



*Live*  
*Interactive*  
Bersama  
Anggota  
Legislatif PKS



BERSAMA M. ADRIAN RASHAD



**Saksikan**  
**Setiap Jum'at**  
pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



image istimewa

## Sambut Hari Anak Nasional, Aleg PKS Meity Dukung Usulan Menimipas Remisi 1.272 Anak

Jakarta (22/07) — Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi XIII DPR RI, Meity Rahmatia mendukung usulan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Agus Andrianto

tentang usulan remisi 1.272 anak binaan pemsarakatan pada Hari Anak Nasional 23 Juli2025.

"Selama itu memenuhi syarat, kami mendukung remisi tersebut. Anak-anak masih memiliki masa depan. Bila dibi-

"Kami berharap pemberian remisi kepada Anak ini akan lebih mendorong mereka untuk semakin giat belajar dan mengembangkan bakat serta keterampilan. Selalu ada kesempatan kedua, second chance, untuk masa depan yang lebih cerah. Masa depan untuk Indonesia Emas,"

**Hj. MEITY RAHMATIA,  
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Komisi XIII DPR RI

na dan dididik secara berkelanjutan, insya Allah, mereka bisa lebih baik, bermanfaat serta berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara," jelasnya saat dihubungi media, Selasa (22/07).

Menteri Imipias, Agus pada Senin (21/07/2025):menyebut, mereka memiliki anak binaan sebanyak 2.096 orang yang tersebar di Lapas dan Rutan. 1.272 telah memenuhi persyaratan secara administratif dan substantif mendapat remisi.

"Kami berharap pemberian remisi kepada Anak ini akan lebih mendorong mereka untuk semakin giat belajar dan mengembangkan bakat serta keterampilan. Selalu ada kesempatan kedua, second chance, untuk

masa depan yang lebih cerah. Masa depan untuk Indonesia Emas," terangnya.

Menurutnya, soal anak ini menjadi atensi khusus. Termasuk pendidikan dan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

"Dalam hitungan hari kita akan memperingati Hari Anak Nasional, jangan lupakan anak yang saat ini terpaksa ada di dalam lembaga pembinaan. Mengang tugas kami, tapi ini juga tanggung jawab kita semua. Kami juga mengajak kita semua untuk mendidik mereka, karena mereka adalah bagian penting generasi negara kita tercinta Indonesia," pungkasnya.



image istimewa

## Hari Anak Nasional, Netty Ajak Semua Pihak Wujudkan Lingkungan Aman dan Sehat untuk Anak

Jakarta (23/07) — Dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan aman, sehat, dan ramah bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

“Anak-anak adalah aset masa depan bangsa. Momentum Hari Anak Nasional ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa investasi terbaik suatu negara adalah memastikan anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia,” ujar Netty dalam keterangannya, Rabu (23/07).

Netty yang konsisten mengawal isu perempuan dan anak menilai, pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui berbagai program, seperti percepatan penurunan stunting, perluasan layanan kesehatan anak, serta penguatan perlindungan sosial bagi keluarga.

“Kita mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat layanan dasar bagi anak dan keluarga. Kerja-kerja ini harus terus ditingkatkan dengan dukungan berbagai pihak, baik dari legislatif, akademisi, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta,” jelas politisi PKS ini.

Netty juga menyoroti sejumlah tantangan kekinian yang dihadapi anak-anak Indonesia, seperti meningkatnya

dispensasi nikah yang berdampak pada pola pengasuhan dan kesiapan mental anak, serta masih bebasnya konten pornografi di ruang digital yang dapat merusak karakter generasi muda.

“Dispensasi nikah pada usia anak harus mempertimbangkan aspek kesiapan fisik, psikis, dan kualitas pengasuhan. Negara perlu hadir dengan regulasi yang tegas dan edukasi yang masif,” ujarnya.

“Regulasi konten digital sangat diperlukan guna memberikan perlindungan pada anak-anak agar tidak terpapar pornografi dan kekerasan yang dapat berdampak pada penyimpangan perilaku.”

Selain itu, Netty menyoroti tingginya angka perokok anak yang masih menjadi tantangan serius di sektor kesehatan masyarakat.

“Iklan rokok yang terselubung, kemasan yang menarik, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor yang perlu

## Hari Anak Nasional, Netty Ajak Semua Pihak Wujudkan Lingkungan Aman dan Sehat untuk Anak

### « SEBELUMNYA

diintervensi secara strategis. Anak-anak harus dibebaskan dari jerat adiksi nikotin,” tegasnya.

Di sisi lain, Netty juga menyampaikan apresiasi terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga dan pola hidup sehat, baik dalam keluarga maupun di kalangan anak-anak.

“Kita melihat tren positif di

berbagai daerah, di mana keluarga mulai aktif berolahraga bersama, dan anak-anak terlibat dalam aktivitas fisik yang bermanfaat bagi tumbuh kembang mereka. Ini harus terus didorong sebagai bagian dari gaya hidup sehat sejak dini,” katanya.

Menurut Netty, tantangan perlindungan anak saat ini semakin kompleks, termasuk maraknya kekerasan berbasis digital, perundungan, ketimp-

ngan akses pendidikan dan gizi di beberapa daerah serta kasus-kasus pengabaian pengasuhan anak dalam keluarga.

“Kita semua harus mengambil peran strategis dalam tumbuh kembang anak. Keluarga sebagai benteng pertama, sekolah sebagai ruang tumbuh, dan negara sebagai pelindung utama. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan Indonesia yang layak anak,” tambahnya.

“Semoga Hari Anak Nasional ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk menghadirkan ruang tumbuh yang semakin baik bagi setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali,” tutupnya.



“Kita mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat layanan dasar bagi anak dan keluarga. Kerja-kerja ini harus terus ditingkatkan dengan dukungan berbagai pihak, baik dari legislatif, akademisi, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta,”

**Dr. Hj. NETTY  
PRASETIYANI, M.Si**  
Anggota Komisi IX DPR RI



image istimewa

## Refleksi Hari Anak Nasional 2025, Reni Astuti: Setiap Anak Bisa Hebat, Negara Harus Hadir

Jakarta (23/07) --- Dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional 2025, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo), Reni Astuti, menekankan pentingnya komitmen penuh pemerintah dalam menjamin keberlangsungan Tri Pusat Pendidikan yang terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai ekosistem utama tumbuh kembang anak Indonesia.

Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema 'Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045' dengan tagline inspiratif 'Anak Indonesia Bersaudara'.

Tema ini menegaskan pentingnya membentuk generasi anak yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya menuju 100 tahun Indonesia merdeka.

"Anak-anak kita adalah aset masa depan bangsa. Mereka membutuhkan ekosistem yang mendukung secara penuh, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat," ujar Reni yang juga dikenal sebagai politisi perempuan sekaligus seorang ibu.

Reni mendorong pemerintah untuk lebih aktif dan konsisten dalam memastikan ketiga pusat pendidikan berfungsi secara optimal.

Ia menekankan bahwa dalam lingkungan keluarga, pemenuhan gizi seimbang dan

kehangatan relasi harus menjadi prioritas.

"Gizi yang baik dan suasana keluarga yang harmonis akan sangat menentukan perkembangan psikologis dan fisik anak," tegasnya.

Dalam konteks pendidikan formal, Reni meminta pemerintah menjamin pemerataan akses pendidikan.

Menurutnya, tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal atau tidak bisa sekolah karena alasan ekonomi, geografis, atau sosial.

"Pendidikan adalah hak dasar anak. Pemerintah harus hadir dan memastikan semua anak Indonesia mendapat pendidikan yang layak dan merata," lanjutnya.

Sementara itu, di lingkungan masyarakat, Reni menyoroti pentingnya rasa aman dan

## Refleksi Hari Anak Nasional 2025, Reni Astuti : Setiap Anak Bisa Hebat, Negara Harus Hadir

### « SEBELUMNYA

perlindungan terhadap anak, termasuk dari dampak negatif dunia digital.

Ia mendorong agar regulasi terhadap paparan konten digital berbahaya bagi anak segera diperkuat.

"Anak-anak hari ini sangat dekat dengan gawai dan media sosial. Tanpa regulasi yang ketat, mereka sangat rentan terpapar hal-hal negatif yang bisa merusak perkembangan moral dan mentalnya. Pemerintah harus segera hadir dalam merespon fenomena ini!", ungkap Reni.

Menutup refleksinya, Reni

menyampaikan bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas anak-anak hari ini.

Karena itu, pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat harus berjalan beriringan dalam menciptakan lingkungan terbaik untuk anak-anak Indonesia.

"Menjaga anak-anak hari ini, berarti menjaga Indonesia esok hari. Semoga Hari Anak Nasional ini menjadi momentum untuk kita semua memperkuat kolaborasi dalam menciptakan generasi hebat menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.



image istimewa



"Anak-anak kita adalah aset masa depan bangsa. Mereka membutuhkan ekosistem yang mendukung secara penuh, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat,

**RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Jawa Timur I



# Wakil Ketua Komisi VIII DPR FPKS Ansory Dorong Perbaikan Menyeluruh dan Inovatif dalam Pengelolaan Ibadah Haji

Jakarta (15/07) — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Ansory Siregar, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh dan pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji: Evaluasi, Solusi, dan Arah Kebijakan Nasional' yang diinisiasi oleh Fraksi PKS DPR RI, Selasa (15/7), di Ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam forum yang juga menghadirkan Dirjen PHU Kemenag RI, Wakil Kepala BP Haji, dan perwakilan BPKH RI sebagai narasumber serta dibuka oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Abdul Kharis Almayahari dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Ansory mengungkapkan keprihatinan atas berbagai permasalahan yang berulang

Focus Group Discussion (FGD)

**Membedah  
Permasalahan  
Penyelenggaraan**

**Ibadah Haji**

Evaluasi, Solusi, dan Arah  
Kebijakan Nasional

dalam penyelenggaraan haji setiap tahun, mulai dari catering, hotel, hingga transportasi.

"Malu kita sebagai seorang muslim mendengarkan hal-hal yang buruk tentang haji. Harusnya ketika mendengar kata 'haji', yang terbayang adalah ibadah yang mulia, bukan korupsi, kartel, atau pengelolaan yang semrawut," ujar Ansory.

Ia juga mengkritik panjangnya masa tinggal jamaah Indonesia di Arab Saudi, yang menurutnya menjadi salah satu

penyebab membengkaknya biaya haji.

"Kalau pekerjaan haji hanya 6-7 hari, kenapa kita harus 41 hari di sana? Kalau bisa dikurangi menjadi 31 hari, maka ongkos makan dan penginapan bisa ditekan," jelasnya.

Menyoroti potensi alternatif solusi, Ansory mengungkapkan bahwa Komisi VIII telah melakukan diplomasi dengan beberapa negara Asia Tengah seperti Kyrgyzstan dan Kazakhstan yang memiliki sisa kuota haji cukup besar dan tidak terpakai.

"Kalau kuota mereka bisa dipakai Indonesia, ini akan mengurangi daftar tunggu haji kita yang sudah mencapai 48 tahun rata-rata," ungkapnya.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan teknis dan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, termasuk sistem nusuk, pengawasan yang berlebihan, dan kebijakan tanazol yang mendadak berubah menjelang hari Arafah. Menurutnya, sebagian besar kekacauan bukan hanya berasal dari pihak Indonesia,



"Nusuk seharusnya bisa dibagikan di Indonesia, jangan semua dibagikan di Saudi. Masalah tanazol juga harus dikomunikasikan dengan baik agar jamaah tidak jadi korban kebijakan yang berubah-ubah,

**H. ANSORY SIREGAR, Lc,**

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

tetapi juga dari pihak Saudi.

"Nusuk seharusnya bisa dibagikan di Indonesia, jangan semua dibagikan di Saudi. Masalah tanazol juga harus dikomunikasikan dengan baik agar jamaah tidak jadi korban kebijakan yang berubah-ubah," tegasnya.

Selain itu, Ansory menyoroti pentingnya reformasi dalam pengelolaan syarikah at-

au operator lokal di Saudi yang mengurus transportasi jamaah. Ia mendorong adanya pemetaan yang lebih terstruktur.

"Kalau bisa, satu embarkasi atau satu kabupaten/kota dipegang oleh satu syarikah agar koordinasi lebih mudah dan tidak semrawut seperti kemarin," ujarnya. Selengkapnya di fraksi.pks.id



image istimewa

## FGD Fraksi PKS DPR Soal Haji, HNW Dukung Suksesnya Kementerian Haji dan Umroh

Jakarta (15/07) --- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menekankan kembali dukungannya untuk menaikkan status kelembagaan penyelenggara Haji dan Umroh dari berstatus Badan sekali-pingkat Menteri untuk menjadi Kementerian Penyelenggara Haji dan Umroh,

Focus Group Discussion (FGD)

### Membedah Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Evaluasi, Solusi, dan Arah  
Kebijakan Nasional

sekalipun kekhawatiran soal status lembaga 'Badan' sudah dijawab dengan akan dibentuknya organ-organ lembaga dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten, tapi ada yang belum terjawab bila dihubungkan dengan Kerajaan Saudi Arabia yg ketat dalam protokoler, karena 'Badan' memang bukan Kementerian (wizaarah) yang punya padanan di sana yaitu Kementerian Haji dan Wakaf.

"Maka demi mengurangi dampak negatif dari ketidakse-taraan lembaga penyelenggara Haji, lebih maslahat kalau status lembaga ini dijadikan Kementerian saja. Dan itu bisa dilakukan melalui penyempurnaan regulasi penyelenggaraan ibadah haji melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2019," demikian rangkuman pernyataan HNW dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Fraksi PKS DPR RI.

Acara yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan berbagai narasumber penting seperti Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS H. Ansory Siregar, Dirjen PHU Kemenag RI, Wakil Kepala BP Haji, dan perwakilan BPKH.

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa HNW ini menyoroti pidato Menteri Agama dalam penutupan haji 2025 yang menyampaikan peralihan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji.

HNW menilai transisi ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat fondasi hukum penyelenggaraan ibadah haji secara nasional.

"Pidato Pak Menteri Agama sangat penting. Beliau menyampaikan bahwa amanah penyelenggaraan haji yang selama ini dipegang Kemenag,

## FGD Fraksi PKS DPR Soal Haji, HNW Dukung Suksesnya Kementerian Haji dan Umroh

### « SEBELUMNYA

sesuai Peraturan Presiden Prabowo, akan dilimpahkan ke badan penyelenggara haji. Ini bukan sekadar perubahan kelembagaan, tapi mengandung amanah umat dan konstitusional yang harus disiapkan secara serius," ujarnya.

Lebih lanjut, HNW yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI mengungkapkan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan segera membahas draft revisi UU Penyelenggara Haji dan Umroh.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPR, pemerintah, dan badan penyelenggara haji agar revisi ini dapat dirumuskan secara komprehensif dan tepat waktu.

"Revisi ini tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, bukan

hanya pemerintah yang dirugikan, tapi jutaan calon jemaah haji. Kita harus cepat, tapi bukan asal cepat. Lebih cepat, lebih bagus—tanpa bertele-tele, asalkan benar dan berkualitas," tegas HNW.

Dalam konteks regulasi, HNW mengapresiasi penguatan sisi konstitusional melalui dimasukkannya Pasal 28f ayat 4 UUD 1945 dalam consideran revisi undang-undang, yang menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi manusia, termasuk kebebasan menjalankan ajaran agama, adalah tanggung jawab negara.

"Ini bukan pilihan, ini perintah konstitusi. Kehadiran negara dalam memenuhi HAM warga Indonesia termasuk dalam hak beribadah seperti penyelenggaraan ibadah haji

adalah imperatif, bukan informatif," ujarnya.

Tak hanya fokus pada regulasi dan kelembagaan, Wakil Ketua MPR RI ini juga menekankan perlunya diplomasi haji yang kuat. Salah satu bentuknya adalah negosiasi untuk menambah kuota haji Indonesia melalui peningkatan quota 1:1000 menjadi 2:1000. Juga melalui kerja sama dengan negara-negara yang memiliki sisa kuota.

"Kami sudah komunikasi dengan Kazakhstan yang kuotanya hanya terpakai separuh. Jika bisa dikerjasamakan, itu akan sangat membantu Indonesia. Ini perlu diplomasi haji yang aktif," ungkapnya.

Mengakhiri keynote-nya, HNW mendukung penuh visi Presiden Prabowo untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih baik dengan biaya lebih terjangkau.

"Kami dukung program Presiden dengan memisahkan antara Kementerian Agama dengan urusan Haji dan Umroh, ini bisa jadi pintu terwujudnya pelayanan haji yang lebih bagus tapi dengan biaya yang lebih terjangkau. Ini tantangan nyata. Revisi UU ini harus bisa menjawab tantangan itu secara konkret dan terukur.

Dan agar Badan Haji yang adalah Kementerian Haji dan Umroh dapat benar-benar sukses laksanakan amanah Umat dan Presiden Prabowo," pungkasnya.



demis mengurangi dampak negatif dari ketidaksetaraan lembaga penyelenggara Haji, lebih maslahat kalau status lembaga ini dijadikan Kementerian saja. Dan itu bisa dilakukan melalui penyempurnaan regulasi penyelenggaraan ibadah haji melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019,"

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI



